



**DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA
DALAM BIDANG POLITIK TAHUN 1945-1966**

SKRIPSI

Oleh

**Sihatul Cismifah
NIM 130210302019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA
DALAM BIDANG POLITIK TAHUN 1945-1966**

SKRIPSI

**diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana pada Program Studi Pendidikan Sejarah
(S1)**

Oleh:

**Sihatul Cismifah
NIM 130210302019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Moch. Hamid dan Ibu Siti Rohmah yang tercinta terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, pengorbanan dan kesabaran demi kesuksesanku menuntutillmu.
2. Bapak Ibu Guru dari MI Miftahul Ulum, MTsN 2 Jember, MAN 2 Jember yang telah mencurahkan ilmunya.
3. Bapak Ibu Dosen di civitas akademika Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember atas telah diberikan dengan penuh kesabaran.
4. Almamater

MOTTO

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan
(Nasution, A.H) *)



*) Nasution, A.H.1985.*Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: Gunung Agung.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sihatul Cismifah

NIM : 130210302019

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik Tahun 1945-1966” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2017

Sihatul Cismifah
NIM 130210302019

SKRIPSI

**DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA DALAM
BIDANG POLITIK TAHUN 1945-1966**

Oleh:

Sihatul Cismifah

NIM 130210302019

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sumardi, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik Tahun 1945-1966” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Jum’at

tangga : 16 Juni 2017

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tim penguji:

Ketua,

Sekretaris

Dr. Sumardi, M.Hum

NIP 19600518 198902 1 001

Anggota I,

Drs. Marjono, M.Hum

NIP 19600422 198802 1 001

Anggota II,

Drs. Sugiyanto, M.Hum

NIP 19570220 198503 1 003

Drs. Sumarjono, M.Si

NIP 19580823 198702 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D

NIP 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik Tahun 1945-1966, Sihatul Cismifah; 130210302019, 2017; xvii + 106; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tetangga dekat Australia adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Namun hubungan politik yang erat antara Australia dan Indonesia berlansung lambat meskipun secara geografis keduanya berdekatan. Sebelum Perang Dunia II, Australia hanya memberikan sedikit perhatian terhadap Indonesia. Australia pada saat itu kurang memperhatikan rakyat Indonesia. Australia hanya menyandarkan diri pada hubungannya dengan Belanda. Namun pada saat itu Australia mengetahui bahwa di Indonesia sedang terjadi perjuangan memperoleh kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Australia mulai memperhatikan dan mendukung Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Australia memberikan dukungan moral terbukti pada saat Belanda melakukan Agresimili terhadap Indonesia pemerintah Australia selalu mencela Belanda.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latarbelakang hubungan politik Australia dengan Indonesia tahun 1945-1966 (2) Bagaimana hubungan politik Australia dengan Indonesia tahun 1945-1966 (3) Bagaimana dampak hubungan politik Australia dengan Indonesia terhadap Australia dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji latarbelakang hubungan politik Australia dan Indonesia tahun 1945-1966, untuk menganalisis hubungan politik Australia dengan Indonesia tahun 1945-1966, untuk menganalisis dampak hubungan politik Australia dengan Indonesia tahun 1945-1966.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah, adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Penulisan ini menggunakan pendekatan hubungan internasional dan menggunakan teorirealis mepolitik.

Hubungan Australia dan Indonesia dipengaruhi oleh Faktor Geografis, Faktor Ekonomi dan Faktor Keamanan. Hubungan Australia dengan Indonesia dipengaruhi oleh partai yang berkuasa di Australia yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1949 menghasilkan kemenangan bagi Partai Liberal dan menggantikan Partai Buruh. Hubungan Australia dan Indonesia mengalami perubahan pada awal tahun 1950 karena munculnya masalah Irian Barat, setelah masalah Irian Barat Australia dan Indonesia dihadapkan dengan masalah PRRI/Permesta. Dalam masalah Irian Barat dan PRRI/Permesta, Australia mendukung sekutu dan menentang Indonesia. Selain masalah Irian Barat, PRRI/Permesta Australia dan Indonesia dihadapkan dengan masalah Konfrontasi Malaysia, dalam masalah ini Australia harus memihak negara Inggris yang merupakan Negara pelindung bagi Australia. Dalam masalah ini juga Australia kembali menentang Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang hubungan politik Australia dengan Indonesia disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor geografis, faktor keamanan dan faktor ekonomi (2) hubungan Australia dengan Indonesia dipengaruhi oleh partai yang berkuasa di Australia yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal (3) Hubungan Australia dan Indonesia memberikan dampak terhadap Australia dan Indonesia baik itu dampak negatif maupun positif. Dampak tersebut dapat mempengaruhi dampak politik dan ekonomi khususnya Indonesia.

PRAKATA

Pujisyukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik Tahun 1945-1966”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh Hasan, M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs, Dafik, M.Sc, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian selama ini, serta selaku membimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Marjono, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penulisan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi pengarahan dan saran dari awal kuliah sampai selesai;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;

9. Orang tuaku tercinta, Ayah Moch. Hamid dan Ibu Siti Rohmah, yang memberikan doa serta nasehat yang menjadi penyemangat setiap langkah hidup dan studi saya;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2013 yang telah membantu, semoga kita menjadi orang yang sukses;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Heuristik	21
3.2 Kritik.....	22
3.3 Interpretasi	23
3.4 Historografi	24
BAB 4. LATAR BELAKANG HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA TAHUN 1945-1966	27
4.1 Faktor Geografis.....	27
4.2 Faktor Ekonomi	29
4.3 Faktor Keamanan	29
BAB 5. HUBUNGAN POLITIK AUSTRALIA DENGAN INDONESIA TAHUN 1945-1966.....	32
5.1 Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik Pada Masa Partai Buruh Tahun 1945-1949	33
5.1.1 Periode Sebelum Agresi Militer Belanda	33
5.1.2 Periode Agresi Militer Belanda yang Pertama	35
5.1.3 Periode Agresi Militer Belanda yang Kedua	38

5.2 Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik	
Pada Masa Partai Liberal Tahun 1949-1966	39
5.2.1 Kebijakan Australia Terhadap Konflik Irian Barat.....	41
5.2.2 Kebijakan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta ..	50
5.2.3 Kebijakan Australia dalam Kofrontasi Malaysia.....	58
BAB 6. DAMPAK HUBUNGAN POLITIK AUSTRALIA DENGAN	
INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA DAN INDONESIA	
TAHUN 1945-1966	67
6.1 Dampak Hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa	
Partai Buruh Tahun 1945-1949	68
6.1.1 Dampak terhadap Australia	68
6.1.2 Dampak terhadap Indonesia.....	69
6.2 Dampak Hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa	
Partai Liberal Tahun 1949-1966	72
6.2.1 Dampak terhadap Australia	72
6.2.2 Dampak terhadap Indonesia.....	73
BAB 7. PENUTUP	77
7.1 Kesimpulan	77
7.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Matrik Penelitian	83
Lampiran B. Naskah Perjanjian Linggarjati.....	84
Lampiran C. Naskah Perjanjian Renville	90
Lampiran D. Piagam Penyerahan Kedulatan	97
Lampiran E. Perjanjian New York.....	98
Lampiran F. Peta Indonesia dan Australia	99
Lampiran G. Situasi Status Quo Indonesia	100
Lampiran H. Gambar Konfrontasi Malaysia.....	101
Lampiran I. Gambar Kunjungan Kepala Negara	103
Lampiran J. Gambar Kunjungan Kepala Negara	104
Lampiran K. Gambar Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Australia	105

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dan telah lama menjalin hubungan bilateral. Secara geostrategis Australia dikelilingi oleh dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Australia berada pada posisi terisolasi, negara terdekat bagi Australia yaitu Indonesia. Kedekatan geografis ini menjadikan Indonesia dan Australia penting untuk melakukan suatu hubungan, meskipun dalam fenomenanya dihiasi berbagai gesekan dan ketegangan (Hamzah, 2008:13). Dengan kata lain meskipun Indonesia dan Australia dua negara yang bertetangga dekat namun memiliki perbedaan etnis, agama, budaya, ideologi dan perbedaan pandangan dalam menjalin hubungan bilateral.

Tetangga dekat Australia adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Namun hubungan politik yang erat antara Australia dan Indonesia berlansung lambat meskipun secara geografis keduanya berdekatan. Sebelum Perang Dunia II, Australia hanya memberikan sedikit perhatian terhadap Indonesia. Australia pada saat itu kurang memperhatikan rakyat Indonesia. Australia hanya menyandarkan diri pada hubungannya dengan Belanda. Namun pada saat itu Australia mengetahui bahwa di Indonesia sedang terjadi perjuangan memperoleh kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Australia mulai memperhatikan dan mendukung Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya (Siboro, 1989:183). Pada waktu Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya, pemerintah Australia memberikan rasa simpati dan dukungan terhadap Indonesia.

Bagi Indonesia, Australia memberikan dukungan moral terbukti pada saat Belanda melakukan Agresi militer terhadap Indonesia pemerintah Australia selalu mencela Belanda. Ketika Belanda melakukan Agresi Militer I dan Agresi Militer II, pemerintah Australia meminta kepada dewan PBB agar menghentikan serangan Belanda. Melihat sikap Australia kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara

(KTN) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Agar dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif, komisi ini berganti menjadi *United Nations Commission on Indonesia* (UNCI) yang bertugas menguasai perundingan antara Indonesia dan Belanda (George, 1980:7). Ketika kemerdekaan Indonesia mencapai pengakuan internasional pada akhir tahun 1949, pemerintah Australia beranggapan bahwa kemerdekaan dan masuknya Indonesia dalam keanggotaan PBB merupakan bantuan dari pemerintah Australia.

Hubungan antara Indonesia dengan Australia sangat dipengaruhi Partai yang sedang berkuasa pada saat itu. Sistem pemerintahan di Australia hampir sama dengan sistem pemerintahan di Amerika yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal (Sunardi, 1985:87). Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Australia juga dipengaruhi oleh pemimpin yang sedang berkuasa. Selain itu adanya perbedaan ideologi antara Partai Buruh dengan Partai Liberal yang menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Australia (Kroef, 1998:49). Pasang surut hubungan Indonesia dengan Australia dapat dipengaruhi oleh siapa dan Partai apa yang sedang berkuasa di Australia. Hubungan baik Indonesia dengan Australia dapat dilihat pada saat Australia dibawah pimpinan Chifley dari Partai Buruh, yang cenderung akomodatif dan lebih mendukung Indonesia. Berbeda saat Australia dibawah pimpinan Robert Menzies dari Partai Liberal yang memperkeruh hubungan Indonesia dengan Australia.

Setelah Partai Liberal memenangkan pemilu di Australia pada tahun 1949, menggantikan Partai Buruh dalam memerintah Australia dibawah pimpinan Perdana Menteri yaitu Robert Menzies. Dengan begitu hubungan antara Indonesia dan Australia akan mengalami hambatan-hambatan dalam menjalin persahabatan dan hubungan bilateral (Reid, 1995:2). Menzies berpendapat bahwa untuk membendung komunis harus dilakukan melalui kekuatan militer, sebaliknya Indonesia berpendapat bahwa Indonesia curiga apabila tindakan militer dilaksanakan untuk melawan komunis maka tindakan tersebut ditujukan untuk melestarikan kolonialisme di Asia Tenggara.

Hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia mengalami perubahan pada awal tahun 1950 karena masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat menjadi masalah utama yang harus ditangani oleh pemerintahan Partai Liberal dalam mewujudkan politik luar negerinya terhadap Indonesia. Klaim Indonesia atas Irian Barat tidak didukung dan dikecam oleh pemerintahan Partai Liberal (Ratih, 1992:98). Indonesia dan Australia melihat wilayah Irian Barat dari persepsi yang berbeda, bagi Indonesia ada dua alasan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatannya. Pertama, secara historis wilayah Irian Barat sudah masuk wilayah Indonesia sejak abad ke-14 ketika kerajaan Majapahit menguasai sebagian wilayah Irian Barat. Kedua, dalam mewujudkan apa yang tercantum dalam Konferensi Meja Bundar 1949 yaitu mengenai wilayah Irian Barat yang akan dikembalikan ke wilayah Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang Australia, Irian Barat mempunyai arti yang sangat strategis dipandang dari aspek pertahanannya (Cholil, 1971:166). Australia berpendapat bahwa lebih baik jika Irian Barat dikuasai Belanda, Australia khawatir jika wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Pada saat itu Indonesia baru saja merdeka dan pembentukan pemerintahannya belum jelas. Australia khawatir tentang masa depan politik negeri Indonesia yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah Irian Barat. Oleh karena itu Australia menginginkan wilayah Irian Barat dikuasai oleh Belanda.

Perlu ditekankan bahwa keterlibatan Australia, Amerika Serikat dan Inggris dalam mendukung pemberontakan PRRI/Permesta adalah untuk menjaga keamanan Australia. Tujuannya adalah mencegah agar Indonesia tidak dapat mengambil alih Irian Barat. Terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta merupakan suatu hal yang menarik bagi Australia. Dari sudut pandang Australia hal itu merupakan suatu potensial untuk menjauhi rezim Presiden Soekarno yang dianggap bertendensi kearah komunisme (Soebadio, 2002:276). Oleh karena itu prospek mempunyai negara tetangga yang komunis tidak menguntungkan bagi Australia.

Pada tahun 1963 hubungan Indonesia dan Australia kembali merenggang, ini disebabkan karena di bentuknya federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia beranggapan

bahwa Malaysia hanya alat untuk mempertahankan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Dibentuknya federasi Malaysia merupakan neokolonialisme Inggris untuk kepentingan strategis dan ekonominya. Lebih dari itu, pembentukan Malaysia merupakan ancaman potensial bagi keamanan Indonesia, karena Singapura tetap menjadi pangkalan Inggris di bawah Persetujuan Inggris-Malaya. Reaksi awal pemerintahan Australia terhadap pernyataan Indonesia mengenai konfrontasi untuk melawan usul pembentukan Federasi Malaysia adalah memperkecil ketegangan yang diakibatkan oleh pernyataan pemerintah Indonesia (Adil, 1997:18). Australia bersikap hati-hati, dan mempunyai banyak pertimbangan. Salah satunya komitmen Australia untuk mendukung Malaysia, karena baik Australia maupun Malaysia adalah anggota persemakmuran Inggris

Alasan penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah ini karena pergantian kekuasaan di Australia dari Partai Buruh ke koalisi Partai Liberal yang membawa perubahan dalam hubungan Indonesia dan Australia. Pasang surut hubungan kerjasama Indonesia dan Australia disebabkan adanya perbedaan pandangan antara Partai Buruh dan Partai Liberal. Hubungan Indonesia terjalin sejak Indonesia merdeka, pada masa itu Partai Buruh yang berkuasa di Australia. Dalam menjalankan politik luar negerinya Partai Buruh lebih mengutamakan kerjasama yang baik dengan wilayah Asia termasuk Indonesia, artinya lebih independen dan tidak terlalu dipegaruhi oleh negara sekutunya yaitu Inggris dan Amerika. Sedangkan kebijakan Partai Liberal dalam menanggapi permasalahan dengan negara lain sangat tergantung pada kedua negara sekutunya tersebut. Hal ini menjadi factor yang sangat mempengaruhi baik buruk dan pasang surut hubungan Indonesia dan Australia, terutama pada saat berlangsungnya pemerintahan Partai Liberal yang meperkeruh hubungan Indonesia dengan Australia.

Selain itu hubungan Australia dan Indonesia menarik untuk disimak karena memiliki sifat yang unik. Keunikan disebabkan pada suatu saat hubungan kedua negara tersebut sangat baik, akan tetapi di lain hubungan kedua negara menjadi sangat tegang. Hal ini terutama apabila ada masalah-masalah yang sangat sensitif

yang berkaitan dengan politik luar negeri kedua negara. Ini dapat terjadi karena sebetulnya kedua negara sama-sama menduduki atau berada dalam posisi strategis, walaupun harus diakui bahwa dari pihak Australia ada perasaan takut akan adanya ancaman dari Indonesia. Disatu sisi menjanjikan kerjasama namun disisi lain juga penuh dengan berbagai perbedaan menyolok terkait dengan kebudayaan, kemajuan pembangunan dan orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Oleh karena itu, penulis memilih permasalahan ini dalam penelitian ilmiah untuk judul *“Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik pada Tahun 1945-1966”*

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk menghindari pemahaman yang beragam dari judul yang dikemukakan. Penulis merasa perlu dan penting memberikan penegasan pengertian judul yaitu *“Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik pada Tahun 1945-1966”*.

Dinamika merupakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika yang ditekankan dalam penelitian ini adalah gerak atau pasang surutnya yang terjadi dalam hubungan Indonesia dengan Australia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Hubungan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana adanya ikatan satu sama lain (Moeliono, 1989:313). Hubungan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah hubungan politik dalam bidang diplomasi yang terjalin antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1966.

Berdasarkan pengertian diatas, maksud yang terkandung dalam judul *“Dinamika Hubungan Australia dan Indonesia dalam Bidang Politik pada Tahun 1945-1966”* adalah pasang surut yang terjadi dalam hubungan Australia dengan Indonesia. Hubungan yang di maksud dalam penelitian ini adalah hubungan politik Australia dengan Indonesia dalam bidang diplomasi yang terjadi selama kurun waktu 1945-1966. Hubungan politik Australia dengan Indonesia dalam bidang diplomasi di

pengaruhi oleh dua partai yang berkuasa di Australia yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Kedua partai tersebut memiliki perbedaan pandangan dan perbedaan kebijakan terhadap Indonesia. Apabila Partai Buruh yang berkuasa di Australia maka hubungan Australia dengan Indonesia bisa dikatakan harmonis. Akan tetapi sebaliknya jika Partai Liberal yang berkuasa maka hubungan Australia dengan Indonesia selalu mengalami perubahan dan ketegangan karena Partai Liberal ini mendukung sekutu daripada Indonesia. Oleh karena itu, kedua partai ini sangat berpengaruh terhadap hubungan politik Australia dan Indonesia dalam bidang diplomasi.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penetapan ruang lingkup penelitian bertujuan memberikan batasan agar suatu penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, baik menyangkut waktu (temporal), tempat (spasial), maupun fokus atau inti kajian yang diteliti.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah tahun 1945-1966. Tahun 1945 dijadikan sebagai batas awal penelitian karena pada tahun 1945 merupakan awal hubungan Australia dengan Indonesia. Hubungan Australia dan Indonesia terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Tahun 1966 dijadikan batas akhir penelitian karena pada tahun 1966 berakhirnya hubungan Australia dengan Indonesia pada masa pemerintah Soekarno.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian adalah Australia dan Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah hubungan politik dalam bidang diplomasi antara Australia dengan Indonesia. Di Australia terdapat dua partai yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal yang mempengaruhi hubungan politik dalam bidang diplomasi dengan Indonesia. Partai Buruh mengutamakan keamanan di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang merupakan tetangga terdekat Australia, maka dari itu hubungan politik Australia dan Indonesia dalam bidang diplomasi terjalin sangat baik pada masa Partai Buruh yang berkuasa di Australia. Sedangkan hubungan politik Australia dan Indonesia dalam bidang diplomasi pada masa Partai Liberal mengakibatkan adanya perubahan dalam hubungan Australia dan

Indonesia. Partai Liberal sangat bergantung kepada negara sekutunya sehingga menentang Indonesia. Hubungan politik Australia dan Indonesia pada masa Partai Liberal dihadapkan pada masalah Irian Barat yang merupakan konflik Belanda dan Indonesia. Dalam konflik ini Australia berpihak kepada Belanda dan menentang Indonesia, selain itu keterlibatan Australia dalam PRRI/Permesta juga merupakan bentuk atau sikap Australia mendukung sekutu sehingga memperlemah tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat. Setelah berakhirnya masalah Irian Barat, Indonesia dihadapkan dengan masalah Konfrontasi Malaysia. Dalam konflik tersebut Australia juga mendukung sekutu dan kembali menentang Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan masalah dan ruang lingkup yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) bagaimana latar belakang hubungan politik Australia dengan Indonesia pada tahun 1945-1966?
- 2) bagaimana hubungan politik Australia dengan Indonesia pada tahun 1945-1966?
- 3) bagaimana dampak hubungan politik Australia dengan Indonesia terhadap Australia dan Indonesia tahun 1945-1966?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengkaji latar belakang hubungan Indonesia dan Australia pada tahun 1945-1966
- 2) untuk menganalisis hubungan politik Indonesia dan Australia pada tahun 1945-1966
- 3) untuk menganalisis dampak hubungan politik Indonesia dan Australia terhadap Indonesia dan Australia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberikan kontribusi dan tambahan wawasan mengenai dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik pada tahun 1945-1966;
- 2) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik pada tahun 1945-1966;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai dorongan motivasi dan inovasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai “Dinamika Hubungan Australia dan Indonesia dalam Bidang Politik pada tahun 1945-1966” baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan misalnya berupa laporan penelitian atau skripsi. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Menurut Chauvel (2005:61-86) dalam bukunya yang berjudul “*Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*” menjelaskan Irian Barat adalah fokus dari konflik besar pertama antara Australia-Indonesia. Pada tahun 1950 pemerintah Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi Irian Barat. Menurut Percy Spender, wilayah tersebut tidak ikut membentuk wilayah Indonesia, tetapi lebih memiliki kemiripan dengan wilayah Australia. Spender menyadari bahwa Australia juga memiliki kepentingan dalam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Masuknya Irian Barat di Indonesia tidak akan menambah stabilitas regional, tetapi lebih merupakan bentuk kelemahan dalam perencanaan strategis Asia Tenggara. Australia menginginkan Belanda mengambil kembali kedaulatannya atas daerah tersebut dan menawarkan bantuan ekonomi, administrasi dan pertahanan sehingga Belanda tidak menyerah pada tuntutan Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan letak dan posisi Irian Barat dan juga kepentingan nasional Australia terhadap Irian Barat. Buku ini tentu bisa dijadikan sebagai sumber akan tetapi buku ini tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai hubungan Indonesia dengan Australia khususnya pada tahun masa pemerintahan presiden Soekarno yaitu tahun 1945-1966. Sehingga peneliti ingin mengkaji hubungan Indonesia dengan Australia yang memfokuskan dalam bidang politiknya saja pada tahun 1945-1966.

Adil (1993: 128-140) dalam bukunya yang berjudul “*Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*” menjelaskan bahwa klaim Indonesia atas Irian Barat dinyatakan oleh Presiden Sukarno dalam berbagai kesempatan pada tahun 1950. Pada 11 Juni, di depan sebuah rapat umum di Jakarta, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi Negara Kesatuan yang meliputi Irian Barat, tanpa Irian Barat Kemerdekaan Indonesia tidaklah lengkap. Langkah awal yang diambil Pemerintah Australia dalam menanggapi pernyataan-pernyataan Sukarno itu adalah berusaha untuk tidak ikut membakar suasana. Hal tersebut menyebabkan Australia menunda untuk mengumumkan sikap resminya mengenai masalah Irian Barat. Sementara itu, pemerintah Australia berusaha membatasi dampak pernyataan presiden Sukarno. Spender menyatakan bahwa klaim Indonesia atas Irian Barat yang dikuasai Australia sama sekali tidak mempunyai dasar, dan setiap percobaan yang dilakukan Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan itu akan dipandang tindakan permusuhan oleh Australia. Dalam buku karya Hilman Adil ini memaparkan mengenai hubungan Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1962. Didalam buku ini hanya memfokuskan bahasan pada masalah Irian Barat saja. Sehingga peneliti mempunyai celah untuk mengkaji hubungan Indonesia dengan Australia karena penelitian yang akan dibahas tidak hanya difokuskan dalam masalah Irian Barat. Buku ini tentu dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh informasi mengenai masalah Irian Barat yang menjadi hambatan terjalannya hubungan Indonesia dengan Australia.

Nasution (1985:82-95) menjelaskan yang pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional/KASAD pada masa kepemimpinan Soekarno awal tahun 1960 menjajaki pendapat Australia mengenai konflik Irian Barat. Knjungan Nasution ke Australia pada bulan April 1961 untuk mengkaji sikap Australia jika terjadi knfrontasi militer antara Indonesia dengan Belanda. Menzies, Perdana Menteri Australia menegaskan bahwa Australia tetap mengakui kedaulaan Belanda di Irian Barat. Bahkan Australia turut menghadiri peresmian papuanisasi yang dilakukan oleh Belanda. Program papuanisasi menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Presiden Soekarno mengutus jendral Nasution untuk meminta bantuan militer pada Uni Soviet.

Tindakan Indonesia tersebut kemudian memaksa Amerika Serikat untuk mendesak Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia mengenai penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam buku tersebut memfokuskan pada tahap penyelesaian akhir konflik Irian Barat dan Peran Militer dan PBB dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Hamid (1999:321-421) dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Politik Australia*" menyatakan bahwa pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai Liberal membawa perubahan dalam hubungan Australia dengan Indonesia. Kebijakan luar negeri Australia yang dipengaruhi oleh situasi perang dingin, membawa Australia kepada sikap pro kepada kekuatan-kekuatan Barat. Pemerintah Australia menyatakan keinginan agar Belanda tetap menguasai Irian Barat. Padahal masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih menggajal dalam menyelesaikan kemerdekaan Indonesia di tangan Belanda.

Pernyataan Australia bukanlah tanpa alasan yang mendasar, karena setelah invasi Jepang ke pulau Irian Barat setelah menjelang Perang Dunia II, masyarakat dan pemerintah Australia lebih meyakini bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia lebih mengenal bangsa Belanda yang berada dalam satu kubu bangsa Barat, daripada Indonesia yang baru merdeka. Maka dari itu, Australia merasa keamanan wilayahnya akan lebih terjamin bila pulau tersebut berada dibawah kekuasaan Belanda. Dalam buku tersebut memaparkan mengenai sistem pemerintahan politik di Australia, dalam buku ini hubungan Indonesia dengan Australia tidak dibahas secara detail. Sehingga peneliti menemukan ruang untuk meneliti hubungan Indonesia dengan Australia, akan tetapi buku ini dapat dijadikan sebagai salah sumber untuk memperoleh informasi mengenai sistem politik yang ada di Australia.

Lockwood (1983:277-283) dalam bukunya yang berjudul "*Armada Hitam*" menjelaskan mengenai dukungan Australia terhadap Indonesia dengan adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda sebagai bentuk dukungan atas perjuangan rakyat Indonesia. Pemerintah yang berkuasa di Australia adalah pemerintahan Partai Buruh dibawah Chifley. Pemerintah Chifley cukup berperan aktif dalam membela kepentingan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Hal ini dibuktikan dengan

reaksi Australia terhadap dua Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda, dan peran Australia dalam Komisi Tiga Negara. Pada saat Agresi Militer Belanda yang kedua ada bulan Desember 1947, pemerintah Australia memperlihatkan sikap simpatinya. Pada tanggal 30 Juli 1947 Australia bersama dengan India mengajukan masalah pertikaian Indonesia-Belanda ke sidang Dewan Keamanan PBB. Usaha Australia ini kemudian melancarkan jalan bagi terbentuknya Komisi Tiga negara. Buku ini membahas mengenai awal hubungan bilateral Australia-Indonesia.

Critchley (1995:58-79) dalam bukunya yang berjudul "*Hubungan Indonesia dengan Australia Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*" menjelaskan bahwa Irian Barat merupakan lingkaran pertahanan terakhir terhadap agresi, karena itu Australia membutuhkan sebuah daerah keamanan. Australia tidak dapat mengubah geografinya, Irian Barat dipandang untuk segala waktu merupakan kepentingan strategis yang vital bagi keamanan persemakmuran. Karena itu merupakan imperative bahwa dikawasan pulau-pulau ini tidak boleh ada yang hadir dan sedikitnya banyak dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Australia, baik dalam jangka waktu dekat maupun panjang. Penyerahan kedaulatan kepada Indonesia merupakan semacam ancaman, sudah menjadi perkiraan yang tidak pernah diragukan oleh pemerintah maupun pihak oposisi. Indonesia dilihat secara politis tampak tidak stabil, secara administrasi kelihatan kacau dan lemah secara militer. Apabila Irian Barat ditempatkan dibawah tanggung jawab Indonesia, anggapan selanjutnya ialah bahwa Australia akan kehilangan wilayah Irian Barat sebagai benteng garis terdepan. Sebaliknya wilayah itu akan berubah menjadi pintu masuk yang potensial bagi musuh dari Asia. Dalam buku tersebut memaparkan hubungan Indonesia dengan Australia buku tersebut memfokuskan pada masalah Irian Barat. Buku ini dijadikan sumber primer oleh peneliti karena di tulis langsung oleh orang yang sezaman. Susan Critchley pernah menjadi anggota Komisi Tiga Negara untuk menengahi masalah Irian Barat yang menjadi perebutan antara Belanda dan Indonesia. Buku ini hanya memfokuskan pada masalah Irian Barat sampai dengan tahap penyelesaiannya.

Sehingga peneliti menemukan ruang untuk mengkaji hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik.

Soebadio (2002:44-100) di dalam bukunya yang berjudul "*Keterlibatan Australia dalam PPRI/Permesta*" di dalam bab 2 menjelaskan bahwa permasalahan Irian Barat yang menjadi sengketa Indonesia-Belanda. Partai Liberal yang berkuasa pada saat itu merasa khawatir akan mempunyai perbatasan dengan negara Asia di Irian Barat. Partai Buruh yang Australia yang dianggap memihak Indonesia dikalahkan oleh Partai Liberal yang memihak Belanda. Khususnya dalam masalah Irian Barat, pemerintah baru Australia memberikan dukungan sepenuhnya pada pemerintah Belanda. Pihak Indonesia menganggap bahwa Irian Barat merupakan adalah bagian dalam wilayah Indonesia . Penolakan Belanda untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatan Indonesia telah mengancam hasil KMB. Bagi Indonesia masalah Irian Barat menjadi tolak ukur untuk mengukur hubungan persahabatan dengan luar negeri. Uni Soviet dan RRC mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Indonesia. Pada tahun 1961 Amerika berubah sikap yang dahulunya bersikap netral mulai berubah memihak Indonesia. Kenndey Presiden Amerika pada saat itu bekerja sama dengan Presiden Indonesia bukan merupakan prospek yang sia-sia, hal ini dapan mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk menuju kearah yang bergunadan konstruktif. Dalam bab 2 yang dipaparkan dalam buku tersebut memfokuskan pada pemerintahan Australia yang sedang berkuasa pada saat itu. Buku ini dijadikan salah satu sumber untuk memperoleh informasi mengenai sistem pemerintah Australia dan kebijakan-kebijakan pemerintah Australia dalam melakukan hubungan politiknya dengan Indonesia .

Siboro (1996:175-197) dalam bukunya yang berjudul "*Sejarah Australia*" menyatakan pada tanggal 29 September 1950 di Den Haag, Spender mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki tuntutan yang sah terhadap Irian Barat. Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa masa depan Irian Barat sangat penting bagi bangsa Australia. Spender menunjukkan pengalaman tentang betapa strategisnya

Irian Barat bagi Australia. Di depan sidang majelis umum PBB tahun 1950, Spender berkampanye tentang Irian Barat, dengan harapan agar Belanda menutup segala kemungkinan perundingan dengan pihak Indonesia. Sampai tahun 1960 hubungan Indonesia dengan Australia masih dipengaruhi oleh pandangan Spender tersebut. Ketegangan hubungan Indonesia-Australia yang bersumber dari masalah Irian Barat ini, mereda setelah masalah itu di selesaikan melalui PBB. Namun warna politik di Indonesia dan Australia masih mengalami ketegangan. Dalam buku tersebut memaparkan mengenai. Dalam buku karya J. Siboro sedikit menjelaskan mengenai hubungan Indonesia dengan Australia. Buku ini memaparkan mengenai Sejarah Australia mulai dari penemuan benua Australia sampai dengan struktur dan system pemerintahannya. Sehingga peneliti mendapatkan ruang dan celah untuk meneliti lebih mendalam mengenai hubungan Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1966.

Soebadio (2002:189-264) di dalam bukunya yang berjudul "*Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*" bab 5 menjelaskan terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi Australia. Dari sudut pandang Australia hal itu merupakan suatu gerakan potensial menjauhi pemerintah Soekarno yang dianggap bertendensi ke arah komunisme dan sikap yang makin tegas terhadap Irian Barat. Sebab utama pemberontakan tersebut dikarenakan rasa ketidakpuasan orang luar Jawa terhadap penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh para pemimpin RI. Australia telah lama mengadakan hubungan dengan kaum pemberontak di Indonesia dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada dukungan Australia terhadap pemberontakan di Indonesia. Keterlibatan Australia terhadap gerakan pemberontakan PRRI/Permesta melalui suatu proses yang dipadukan dengan keinginan Australia memperlemah kedudukan pemerintahan rezim Sukarno, sehingga memperlemah tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat, di samping itu kepentingan Australia masih harus tetap mempertimbangkan dua negara protektornya. Dalam bab 5 secara khusus membahas mengenai keterlibatan Australia dalam PRRI/Permesta. Buku ini dapat dijadikan

salah satu sumber mengenai campur tangan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta yang juga akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Australia.

Adil (1997:115-127) dalam bukunya yang berjudul "*Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966*" menjelaskan pada tahun 1963-1966 juga merupakan periode antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebabkan dibentuknya Federasi Malaysia, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Malaysia hanyalah sekedar alat untuk mempertahankan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara, ini merupakan proyek neokolonialisme Inggris untuk melindungi kepentingan strategis dan ekonominya. Reaksi awal pemerintahan Australia terhadap pernyataan Indonesia mengenai konfrontasi untuk melawan usul pembentukan Federasi Malaysia adalah memperkecil ketegangan yang diakibatkan oleh pernyataan pemerintah Indonesia. Australia bersikap hati-hati, dan mempunyai banyak pertimbangan. Salah satunya komitmen Australia untuk mendukung Malaysia, karena baik Australia maupun Malaysia adalah anggota persemakmuran Inggris. Pada 7 Januari 1965 presiden Sukarno menyatakan keluar dari anggota PBB karena Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB membuat Indonesia menjadi lebih dekat dengan blok komunis, dan membentuk Poros Jakarta-Peking-Hanoi. Pemerintah Australia melihat perkembangan ini dengan penuh keprihatinan karena meningkatnya pengaruh komunis terhadap Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta di tandatangi persetujuan normalisasi hubungan kedua negara dan kedua pemerintahan memulihkan hubungan diplomatik. Atas persetujuan itu berakhirilah Konfrontasi Indonesia Malaysia. Dalam buku tersebut dijelaskan secara khusus mengenai kebijakan Australia terhadap Indonesia tahun 1962-1966, salah satunya Konfrontasi Malaysia. Buku ini hanya memaparkan hubungan Indonesia dengan Australia pada tahun 1963-1966. Buku ini membahas keterlibatan Australia dalam Konfrontasi Malaysia, sehingga peneliti mendapatkan celah untuk meneliti secara mendalam mengenai hubungan politik Indonesia dengan Australia tahun 1945-1966.

Menurut penelitian Muyasaroh (2015) yang berjudul *“Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962”* menjelaskan upaya-upaya Indonesia dalam pengembalian wilayah Irian Barat kedalam wilayah Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Australia, padahal persengketaan wilayah Irian Barat ini merupakan persengketaan antara Indonesi-Belanda. Australia memihak Belanda karena Australia beranggapan jika Irian Barat dikuasai Belanda maka Australia akan terjamin masa depannya. Salah satu usaha yang dilakukan dalam penyelesaian konflik Irian Barat ini adalah pemerintah Indonesia dan Australia melakukan langkah-langkah diplomasi. Bagi Indonesia, penyelesaian itu berarti pemenuhan aspirasi-aspirasi nasionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muyasaroh tahun 2015, lebih memfokuskan pada masalah Irian Barat sampai tahap penyelesaiannya. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji dinamika hubungan Indonesia dengan Australia tahun 1945-1966 lebih mendalam dan mengembangkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Menurut penelitian Wijayanti (2012) yang berjudul *“Hubungan Bilateral Indonesia-Australia tahun 1945-1995”* menjelaskan hubungan Australia-Indonesia yang terjadi secara periodic selama beberapa dekade dipengaruhi oleh beberapa perbedaan yang substansial dalam aspek politik, kebijakan luar negeri, keamanan dan ekonomi. Berdasarkan perspektif politik, keamanan, dan ekonomi masih kurang memperhatikan satu sama lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar yang kokoh bagi hubungan yang stabil. Kekhawatiran keamanan telah menyebabkan ketidakpercayaan yang dapat mengarah pada hubungan kedua negara yang kuran baik. Penelitian yang dilakukan oleh Wiayanti tahun 2012, mengkaji hubungan Indonesia dengan Australia dalam segala bidang dan dengan lingkup bahasan yang sangat luas, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji, peneliti akan membahas mengenai dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik dan tahun yang berbeda.

Menurut penelitian Thayeb (2008) yang berjudul *“Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemenangan Partai Buruh”* Hubungan Indonesia dan Australia pada

era Soekarno terjadi pada 1954-1950 sangatlah kuat, karena Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Hal ini diwujudkan dalam peran Australia sebagai mediator perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam usaha memerdekakan diri. Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan Indonesia dan Australia pada saat Partai Buruh yang berkuasa. Penelitian yang dilakukan oleh Thayeb pada tahun 2008, membahas mengenai hubungan Indonesia dengan Australia pada masa pemerintahan Partai Buruh, jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, penelitian yang dikaji oleh peneliti tidak memfokuskan pada pemerintahan Partai Buruh, akan tetapi membahas dalam lingkup waktu yang berbeda yaitu tahun 1945-1966. Oleh karena itu penelitian yang akan dikaji mengembangkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian diatas peneliti mendapatkan ruang dan celah untuk mengkaji dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik tahun 1945-1966. Sehingga penelitian yang akan dikaji oleh penulis mengembangkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai latar belakang hubungan Indonesia dengan Australia, dinamika hubungan Indonesia dengan Australia, dan dampak hubungan Indonesia dengan Australia terhadap Indonesia.

Penulisan skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis dinamika hubungan Indonesia dengan Australia. Mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan (Kartodirjo, 1992:24).

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan ini adalah menggunakan pendekatan hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Hubungan internasional yang ada di beberapa negara merupakan bagian dari kebijakan politik disuatu negara (Morgenthau, 2010:22). Pendekatan hubungan internasional digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan internasional

Indonesia dan Australia dalam bidang politik pada tahun 1945-1966. Dan bagaimana upaya kedua negara dalam menjalankan politik luar negeri.

Hubungan internasional dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dinegaranya. Hubungan Indonesia dengan Australia sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa pada masa itu. Bahkan pengaruh tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap Indonesia maupun Australia. Pada saat Partai Liberal berkuasa di Australia menggantikan Partai Buruh maka kebijakan Australia terhadap Indonesia juga akan berubah, maka perubahan sistem pemerintahan tersebut juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Australia. Dalam politik internasional memang ditandai dengan koperasi dan kompetisi atau bahkan konfrontasi antar negara. Jika dua negara terlibat dalam suatu konflik kepentingan, maka hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama, kedua negara melakukan penyelesaian politik lewat diplomasi. Kedua, apabila jalan pertama tidak bisa ditempuh maka jalan kedua adalah konfrontasi militer (Rais, 1989:13). Selain itu hubungan internasional tidak lepas dari kepentingan nasional, menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Penulis menggunakan teori realisme politik dari Morgenthau, yang memiliki beberapa asumsi yaitu: yang pertama, tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Kedua, negara merupakan kesatuan dan bersifat rasional, dalam kata lain bersifat rasional, yang artinya adalah negara akan berhati-hati tidak akan bertindak di luar kemampuannya karena tanggung jawab negara adalah untuk melindungi rakyatnya. Ketiga, negara sebagai aktor utama yang melakukan hubungan dengan negara lain dengan berbagai tendensi seperti untuk memperoleh kepentingan. Keempat adalah konsentrasi utama sebuah negara yaitu survival, yang dimaksud dengan survival adalah kemampuan negara untuk mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya dan untuk mempertahankan eksistensinya (Morgenthau, 2010:35).

Morgenthau juga menyatakan bahwa aktor di panggung politik internasional adalah negara. Akan tetapi tidak semua tindakan negara yang ditunjukkan kepada negara lain itu adalah politik dan juga tidak semua negara pada setiap saat memiliki keterlibatan yang sama luasnya dalam ranah politik internasional.

Teori realisme politik dalam penelitian ini adalah negara sebagai aktor utama yaitu Indonesia dan Australia karena kedua negara itu sama-sama memiliki kekuasaan dan sifat yang rasional dalam melakukan hubungan internasional. Dalam teori realisme ini hubungan antarnegara lebih penting daripada politik domestik atau politik dalam negeri.

Prinsip-prinsip realisme politik menurut Morgenthau yaitu:

- 1) Politik internasional merupakan wadah suatu negara dalam memenuhi *interest* (kepentingan) sebagai tujuan mendapatkan *power* (kekuatan). Dalam melakukan suatu hubungan internasional salah satu tujuannya adalah untuk mendapat kekuatan. Dalam hubungan Indonesia dan Australia, pemerintah Australia menunjukkan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia, terbukti pada saat Indonesia berusaha mengembalikan wilayah Irian Barat masuk kedalam wilayah Indonesia, Australia menunjukkan sikap kepentingan nasionalnya terhadap wilayah Irian Barat. Irian Barat merupakan wilayah strategis bagi pertahanan keamanan Australia, maka dari itu Australia mendukung jika Irian Barat dikuasai oleh Belanda karena jika Irian Barat dikuasai Belanda maka masa depan Australia akan terjamin.
- 2) Kunci untuk memahami politik internasional adalah mendefinisikan konsep kepentingan dalam kaitannya dengan kekuasaan. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain, kepentingan nasional terwujud apabila didukung oleh negara yang memiliki power. Australia yang pada saat itu merupakan negara persemakmuran Inggris dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia khususnya kepentingan Australia terhadap wilayah Irian Barat.

- 3) Bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bermacam-macam dalam waktu, tempat dan konteks, akan tetapi konsep kepentingan akan tetap sama. Bentuk kekuatan negara Australia berbeda dengan Indonesia yang pada saat itu baru merdeka. Dalam periode tahun 1945-1966 terjadi beberapa pergantian kekuasaan di Australia dari Partai Buruh ke Partai Liberal. Hal tersebut juga berdampak terhadap Indonesia karena sifat, kebijakan dan bentuk kekuasaan di Australia berubah. Akan tetapi kepentingan dan tujuannya tetap sama yaitu untuk kepentingan nasional dalam pertahanan keamanan.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas bahwa dalam hubungan internasional tidak lepas dari unsur-unsur penting seperti negara, kekuasaan dan kepentingan nasional, unsur tersebut saling berkaitan sehingga menimbulkan kekuasaan yang seimbang. Dan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia akan kekuasaan begitu pula negara yang sangat mementingkan diri sendiri.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data-data yang digunakan adalah data-data sejarah mengenai dinamika hubungan Australia dengan Indonesia dalam bidang politik pada tahun 1945-1966. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk 1985: 32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

1. Heuristik

Tahapan yang pertama dalam metode sejarah adalah heuristik. Heuristik merupakan tahapan bagi sejarawan dalam usahanya untuk memilih suatu objek dan juga mengumpulkan informasi mengenai subjek tersebut. Heuristik sejarah tidak jauh berbeda dengan kegiatan bibliografis yang lain berkaitan dengan buku-buku maupun dokumen (Gottschalk, 1985:35). Heuristik dalam penelitian ini, peneliti dalam tahap ini mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas (Sjamsuddin, 1996:67). Tahap heuristik dalam penelitian ini melakukan kegiatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Oleh karena kajian ini berupa kajian pustaka, maka penulis harus mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik berupa artikel, buku maupun laporan penelitian yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia pada Bidang Politik pada Tahun 1945-1966”. Dalam penelitian ini, sumber-sumber sejarah diperoleh penulis dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Pendidikan Sejarah dan koleksi pribadi penulis. Maka peneliti berhasil menemukan sumber primer dan beberapa sumber sekunder.

Pada tahap heuristik ini sumber primer yang didapatkan oleh penulis adalah buku karya Susan Critchley yang berjudul *“Hubungan Australia dengan Indonesia Faktor Geografi, Politik, dan Strategi Keamanan”*. buku tersebut dikatakan sumber primer karena ditulis oleh saksi mata dan sezaman. Susan Crithley ini pernah menjadi anggota Komisi Tiga Negara untuk menengahi perundingan Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat. Dan beberapa sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah buku karangan Hilman Adil, yaitu *“Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962”*, buku karangan Prof. Richard Chauvel yaitu *“Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral”*, buku karya George Margaret yang berjudul *“Australia dan Revolusi Indonesia”*, buku karya Zulkifli Hamid yang berjudul *“Sistem Politik Australia”* Buku karangan Soebadio Hadi yang berjudul *“Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA”*, buku karya Richard Chauvel yang berjudul *“Budaya dan Politik Australia”*, buku karangan Hardjono Ratih yang berjudul *“Suku Putihnya Asia: Perjalan Australia Mencari Jati Dirinya”*. Buku karya Sunardi yang berjudul *“Politik Luar Negeri Australia di Bawah Partai Buruh”*, buku karya Kroef J. yang berjudul *“Masalah Politik dan Keamanan Australia”*, buku karya Reid, A. yang berjudul *“Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”*. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari perpustakaan Universitas Jember, toko-toko buku dan koleksi pribadi penulis. Semua sumber yang dipaparkan diatas digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

2. Kritik

Tahap yang kedua adalah kritik terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Selain mengkritik sumber perlu dilakukan penyeleksian sumber. Lewat penyeleksian sumber ini peneliti dapat meniadakan atau menyingkirkan sumber-sumber yang tidak otentik. Sehingga menghindari adanya sumber palsu dalam penulisan sejarah. Seorang sejarawan harus melakukan penyelidikan terhadap kredibilitas dari sumber-sumber yang telah diperoleh sebelumnya dalam tahap

heuristik (Gottschalk, 1985:95). Setelah sumber sejarah terkumpul tahap berikutnya kritik sumber dilakukan setelah penulis berhasil mengumpulkan sumber yang selanjutnya akan dikritik untuk memperoleh keabsahan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern (Abdurrahman, 2007:68).

Kritik ekstern dilakukan oleh penulis dengan cara melihat dan menganalisis secara rinci literatur-literatur yang telah diperoleh sebelumnya. Kritik ekstern bertujuan untuk melihat dan menilai apakah sumber yang digunakan itu asli atau tidak. Penulis melihat keaslian sumber dengan melihat sampul, tahun terbit, judul, pengarang apakah sumber yang didapat benar benar sejaman dengan masalah yang diteliti. Tidak hanya sampai disitu saja, hal seperti kertas yang dipergunakan apakah memang menggambarkan atau cocok dengan angka tahun terbit yang tertera dalam buku. Seperti halnya buku karya Susan Critchley yang berjudul “*Hubungan Australia dengan Indonesia Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*” yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Sedangkan kritik intern digunakan oleh penulis untuk meneliti kembali sumber yang telah terbukti otentitasnya, yang mana dalam hal ini akan di uji kembali dengan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis tidak hanya mencermati bentuk fisiknya saja namun juga melihat substansi yang akan dijadikan sumber untuk dilakukan perbandingan dengan sumber lain terkait dengan kebenaran tentang isi buku yang dijadikan sebagai sumber dan apakah dapat dipercaya kebenarannya. Diharapkan dengan melakukan kritik intern semacam itu akan menghasilkan fakta yang dapat dipercaya (*credible*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

3. Interpretasi

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahap untuk menambah atau mengurangi (seleksi dan penyusunan) fakta-fakta sejarah (Gottschalk, 1985:144). Tahap ketiga dalam penelitian ini yaitu interpretasi. Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan

sedangkan sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 2013:78-79). Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai pengertian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk menganalisis data yang diperoleh, kemudian membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Peneliti pada tahap ini melakukan penguraian terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian menghubungkannya menjadi suatu kesatuan yang logis. Fakta-fakta yang diperoleh oleh peneliti kemudian disusun secara kronologis sehingga membentuk fakta rasional dan faktual yang berdasarkan pada aspek yang akan dikaji oleh peneliti yaitu mengenai Dinamika Hubungan Indonesia dengan Australia dalam Bidang Politik pada Tahun 1945-1966.

4. Historiografi

Setelah dilakukan interpretasi, tahap yang terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara untuk merekonstruksi suatu kesaksian atau kisah masa lampau berdasar sumber yang telah diperoleh. Selain itu, historiografi adalah sesuatu deskripsi mengenai masyarakat-masyarakat, kondisi-kondisi, gagasan-gagasan, dan lembaga-lembaga yang lampau sebagai penelitian yang bersifat sejarah (Gottschalk, 1985:143). Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan merupakan cara penelitian, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penelitian hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir atau penarikan kesimpulan (Abdurahman, 2007:76). Pada tahap historiografi, peneliti berusaha merangkai fakta sejarah yang didapat dari ketiga langkah yang sudah dipaparkan di atas dan berusaha merekonstruksi imajinasi dengan cara menulis fakta sejarah menjadi kisah sejarah sehingga menjadi kronologis, logis, dan sistematis. Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan dengan bahasa

yang baik, menyajikan bukti-buktinya dengan jelas dan disampaikan sesuai dengan perjalanan sejarah serta harus argumentatif.

Penyajian tulisan ilmiah ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi tersusun dalam tujuh bab. Bab 1 menyangkut tentang pendahuluan dari penelitian yang berisi latar belakang yakni gambaran hubungan Indonesia dengan Australia. Berdasarkan latar belakang tersebut menemukan permasalahan serta alasan untuk memilih judul “Dinamika Hubungan Indonesia dengan Australia dalam Bidang Politik pada Tahun 1945-1966”, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang hasil review buku serta penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan dinamika hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik pada tahun 1945-1966, pendekatan dan teori yang relevan terhadap penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hubungan internasional dan teori realisme politik. Bab 3 metodologi penelitian, bab ini menjelaskan tentang kegiatan peneliti dalam mendapatkan sumber meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Bab 4 memaparkan tentang latar belakang hubungan Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1966, menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi hubungan Indonesia dan Australia, di antaranya faktor historis, faktor geografis dan faktor keamanan. Bab 5 memaparkan tentang pembahasan mengenai hubungan politik Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1966. Hubungan politik Indonesia dengan Australia pada masa Partai Buruh dan pada masa Partai Liberal, pada masa Partai Liberal hubungan Indonesia dan Australia tidak berjalan dengan baik seperti pada masa Partai Buruh yang mengakibatkan pasang surut hubungan Indonesia dengan Australia, hal tersebut ditandai dengan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia antara lain: 1) masalah Irian Barat, 2) keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta, 3) Konfrontasi Malaysia. Bab 6 memaparkan tentang dampak hubungan politik Indonesia dengan Australia terhadap Indonesia dan Australia. Hubungan politik Indonesia dan Australia berdampak pada politik dalam negeri dan berdampak pada

politik luar negeri. Bab 7 yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi karya ilmiah skripsi ini dan saran.



BAB 4. LATAR BELAKANG HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA TAHUN 1945-1966

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang hubungan Australia dengan Indonesia. Latar belakang hubungan Australia dengan Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor geografis, faktor ekonomi dan faktor keamanan.

4.1 Faktor Geografis

Secara geografis Australia menempati lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, serta dikelilingi oleh dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bagian barat Australia diapit oleh Samudera Hindia yang merupakan jalur transportasi yang menghubungkan Australia dengan benua Afrika, anak benua India dan kawasan Asia Tenggara. Sementara dibagian timur Australia dikelilingi oleh Samudera Pasifik yang menghubungkan dengan bagian utara dan selatan benua Amerika. Pada bagian utara Australia dipagari oleh pulau-pulau Pasifik Selatan dengan Indonesia dan *New Guinea* (Irian Barat) sebagai penyangga utamanya (Adil, 1993:7). Oleh karena itu kepentingan Australia terhadap pulau-pulau utara Australia bermakna startegis dalam sistem pertahanan Australia, yakni sebagai benteng petahanan dan invasi musuh juga merupakan titik kelemahan utara Australia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki posisi strategis dan penting bagi Australia.

Sementara Indonesia, terletak di sepanjang garis khatulistiwa yakni antara bagian ujung daratan Asia Tenggara dan Australia. Oleh karena itu kedudukan Indonesia terlihat seperti sebuah jembatan antara Asia dan Australia. Indonesia terbujur sepanjang kira-kira 5.543 km dari arah timur ke barat dan 1.227 km dari utara dan selatan. Sebagian besar Kepulauan Indonesia terletak dibagian selatan garis khatulistiwa. Indonesia mempunyai luas wilayah kira-kira 1,9 juta km persegi, yang meliputi 13.667 buah pulau (Sunarti, 2014:43). Indonesia diapit oleh dua Benua dan dua Samudera. Secara detail, pada bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan

Benua Asia. Sedangkan pada bagian Tenggara Indonesia berbatasan dengan Benua Australia. Pada arah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Hindia dan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudera Pasifik.

Luas wilayah Indonesia ini tentu saja mempunyai batas-batas wilayah antar negara. Utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia. Timur Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Selatan berbatasan dengan Australia (Ensiklopedia, 1990:9-10). Bentuk, keadaan, posisi dan lokasi geografis Indonesia sangat mempengaruhi dalam menetapkan kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri.

Kedekatan geografis Australia dan Indonesia, menjadikan Australia merasa perlu untuk melakukan suatu hubungan dengan Indonesia. Australia berpendapat bahwa invasi asing akan datang dari daratan Asia atau dari Indonesia yang berada di seberang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Maka dari itu pertahanan militer Australia secara tradisional terpusat pada pertahanan garis pantai utaranya, yaitu berhadapan dengan Indonesia. Sedangkan kepentingan strategis Australia diukur dari jarak negara-negara tersebut terhadap Australia (Soebadio, 2002:45). Berdasarkan hal tersebut mengartikan bahwa Indonesia menduduki tempat terpenting bagi keamanan Australia.

Australia sebagai sebuah benua dikelilingi dua samudera, dan pulau-pulau yang berdekatan membentuk kunci strategis bagi Australia. Meskipun dapat dipandang sebagai sebuah penangkal bagi Australia, pulau-pulau tersebut dianggap sebagai garis lemah dalam pertahanan. Kekhawatiran bahwa keamanan Australia akan terancam apabila pulau-pulau tersebut dikuasai oleh musuh. Menyadari bahwa sebuah invasi asing yang dilancarkan melalui Samudera Hindia dan Samudera Pasifik hanyalah merupakan kemungkinan yang sangat kecil, kesiapan militer Australia secara tradisional dipusatkan pada pertahanan garis pantainya di bagian utara. Garis pantai bagian utara ini berhadapan langsung dengan kawasan Asia Tenggara, yakni kepulauan Indonesia (Adil, 1993:8)

4.2 Faktor Ekonomi

Indonesia merupakan negara yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi Australia. Indonesia kaya akan sumber daya alam sehingga Australia tertarik untuk melakukan hubungan dengan Indonesia. Selain itu, pentingnya Indonesia bagi Australia mencerminkan hubungan yang kuat bahwa hubungan Australia dan Indonesia akan selalu menjadi penting. Selain kaya akan sumber daya alam, posisi Indonesia yang memegang rute perdagangan Australia dengan populasi dan posisinya di Asia Tenggara dan pembangunan serta diversifikasi kemitraan bilateralnya merupakan hal-hal yang patut diperhitungkan. Indonesia mempunyai arti penting bagi Australia dan akan menjadi penentu dari keamananan Australia dimasa yang akan datang. Australia telah diuntungkan dengan posisi Indonesia dalam Asia Tenggara, Australia telah diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan ekonomi serta dukungan kerja sama regional. Selain itu kombinasi jumlah penduduk, luas territorial, potensi ekonomi dan kekuatan politik yang dimiliki menjadikannya negara yang paling berpengaruh di Asia Tenggara (Chauvel, 2005:6).

Sebagai negara yang kaya sumber daya alam tentunya menjadi sangat penting bagi Australia didukung dengan kedekatan geografisnya yang akan juga mempengaruhi hubungan kedua negara karena Indonesia merupakan rute perdagangan Australia. Selain itu Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga Australia menginginkan untuk melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia, baik itu perdagangan atau ekspor impor.

4.3 Faktor Keamanan

Keamanan suatu negara atau beberapa negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa lebih dulu memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan, diantara negara-negara kawasan tersebut. Dalam hubungan internasional, negara akan mempertahankan segalanya demi pencapaian keamanan nasionalnya. Keamanan nasional merupakan nilai yang sangat penting dalam menjalin hubungan

internasional. Secara sederhana, keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan kekuatan (Sufri, 1989:23).

Selama berlangsungnya Perang Dunia I, Australia berada di belakang Inggris. Angkatan perang Australia diperbantukan kepada angkatan perang Inggris. Selama Perang Dunia I, lebih dari 300.000 pasukan Australia diberangkatkan ke daerah Timur Tengah dan Eropa untuk membantu Inggris. Australia kehilangan pasukan kurang lebih 60.000 orang. Setelah Perang Dunia I selesai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia dapat dan berhak di sejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Pemerintah dan rakyat Australia menuntut pengakuan penuh sebagai negara yang berdaulat penuh. Dalam perundingan-perundingan perdamaian di Versailles, Perdana Menteri Australia William Hughes, mendesak agar Australia diakui memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Perjanjian Versailles ini merupakan perjanjian dengan bangsa lain yang pertama kali di tandatangani oleh Australia atas namanya sendiri (Siboro, 1996:178).

Dalam tahun 1931, *Statue of Westminster* secara resmi mengakhiri kekuasaan parlemen Inggris atas negara-negara dominion. Dengan demikian Inggris tidak lagi mengawasi hubungan luar negeri Australia. Pada saat itu pula Australia merdeka secara penuh. Sampai tahun 1940 Australia belum mempunyai perwakilan di negara lain. Australia masih merasa yakin atas kemampuan Inggris dengan jumlah angkatan laut serta jaringan kerja pangkalannya mampu melindungi keamanan Australia. Adanya pangkalan laut Inggris di Singapura, dipandang cukup kuat menjaga keamanan Australia dari arah utara. Mengadakan hubungan langsung dengan negara lain dipandang belum terlalu penting, karena hubungannya dengan Inggris masih cukup memenuhi keperluan Australia.

Serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939, menyulut api Perang Dunia II. Kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Australia juga dengan segera menyatakan dukungannya kepada Inggris. Dalam waktu yang relatif singkat, hamper seluruh Eropa diserang oleh Jerman yang melancarkan perang kilat bersama Italia. Dua tahun setelah terjadinya Perang Dunia II pada

tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang secara tiba-tiba pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbour. Serangan Jepang inilah yang melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia II. Jepang berhasil menyerang Malaya, Filipina dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia. Menyadari bahwa Inggris tidak mungkin memberi bantuan kepada Australia, pemerintah Australia meminta bantuan kepada Amerika Serikat, bahwa hanya dengan bantuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat, Australia bisa terhindar dari serbuan Jepang. Hal ini tentu akan mempunyai dampak tersendiri terhadap pandangan Australia sebagai negara yang berada di Pasifik (Siboro, 1996: 179).

Sadar bahwa Amerika Serikat yang melindungi Australia dari serangan Jepang akan tetapi Australia tetap berhubungan baik dengan Inggris. Australia semakin dekat dengan Amerika Serikat, semakin besarnya pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat untuk keamanannya. Sesudah Perang Dunia II, Australia lebih menyadari dirinya sebagai negara yang terletak di Pasifik dan dekat dengan Asia. Posisi Australia yang dekat Asia, meningkatkan kesadaran Australia sebagai bagian dari Asia Tenggara, paing tidak lebih menyadari bertetangga dekat dengan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tetanggara khususnya Indonesia. Oleh karena itu, Australia mulai tertarik pada keadaan dan perkembangan di daerah kawasan tersebut untuk bisa hidup berdampingan secara damai dan bertetangga baik dengan negara-negara dalam lingkungan regional kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

BAB 6. DAMPAK HUBUNGAN POLITIK AUSTRALIA DENGAN INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA DAN INDONESIA 1945-1966

Hubungan yang terjalin antara Australia dengan Indonesia tidak sepenuhnya berjalan harmonis. Hubungan Australia dengan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah atau partai yang sedang berkuasa di Australia. Di Australia ada dua Partai besar yang mempengaruhi politik luar negeri Australia. Hubungan Australia dengan Indonesia sangat baik terjadi pada tahun 1945-1949 pada saat itu Partai Buruh yang berkuasa di Australia. Awal hubungan Australia dengan Indonesia terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Australia memberikan simpati yang besar terhadap rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sikap Partai Buruh yang demikian bertentangan dengan sikap Partai Liberal yang pada saat itu memihak Belanda.

Sebaliknya hubungan Australia dan Indonesia pada saat pemerintahan Partai Liberal banyak sekali mengalami ketegangan diantara kedua negara. Partai Liberal menggantikan Partai Buruh pada tahun 1949, dengan bergantinya pemerintahan di Australia maka akan berdampak pada hubungan Australia dengan Indonesia. Hubungan Australia dengan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1949. Partai Liberal pada saat itu di hadapkan dengan konflik Indonesia dengan Belanda yaitu konflik Irian Barat, dalam konflik Irian Barat Australia memihak Belanda dan mulai menentang Indonesia. Selain masalah Irian Barat, Australia juga terlibat dan memihak sekutu dalam Pemberontakan PRRI/Permesta dan Konfrontasi Malaysia.

Dinamika yang terjadi dalam hubungan Australia dan Indonesia mempunyai dampak terhadap Australia dan Indonesia. Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai dampak hubungan Australia dengan Indonesia terhadap Australia dan Indonesia.

6.1 Dampak Hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa Partai Buruh terhadap Australia dan Indonesia tahun 1945-1949

Hubungan Australia dengan Indonesia terjalin sangat baik pada masa Partai Buruh yang berkuasa di Australia. Awal hubungan Australia dengan Indonesia terjadi pada tahun 1945, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya Australia memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Sikap Australia yang demikian memberikan dampak bagi Australia maupun dampak bagi Indonesia.

6.1.1 Dampak terhadap Australia

Hubungan Australia terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, bentuk dukungan Australia terhadap Indonesia ketika Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama, Australia yang menasehatkan kepada pihak Indonesia untuk meminta bantuan kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui perantara India. Pada waktu Belanda melaksanakan Agresi Militer II, Australia meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar serangan Belanda segera dihentikan. Melihat sikap Australia seperti itu, Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya ketika PBB membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik atau lebih di kenal dengan nama Komisi Tiga Negara, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Agar dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif, komisi ini kemudian di tingkatkan menjadi *United Nations Commissions on Indonesia* (UNCI). UNCI terus mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan di atas kapal Renville sampai dengan Konferensi Meja Bundar (Siboro, 1996:184).

Ketika kemerdekaan Indonesia mencapai pengakuan internasional pada akhir tahun 1949, Australia berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan Australia beranggapan bahwa, Australia merupakan sponsor dalam kemerdekaan dan masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Sikap Australia ini, menjadikan Australia berhasil dalam menjalankan politik luar negerinya dalam membuat Belanda kalah. Hal ini mengakibatkan Australia

menjadi tetangga yang baik bagi Indonesia, sama halnya dengan Pandangan Federasi Buruh yang mengutamakan dan menginginkan hidup damai di kawasan Asia Tenggara.

Sikap Australia yang mendukung Indonesia ditentang oleh sikap kelompok Oposisi yang pro terhadap Belanda seperti yang dikatakan oleh R.G. Menzies pemimpin Oposisi, bahwa Australia harus memihak Belanda apapun akibatnya. R.G Menzies juga menyatakan bahwa:

“...Jika kita di persalahkan, saya akan mengatakan dengan tenang bahwa pemerintah ini telah menerima sebuah kebijaksanaan Hindia Belanda yang telah dirancang oleh para komunis Australia, yaitu sebuah kebijaksanaan untuk menghalau orang-orang berkulit putih dari Hindia Belanda” (Adil, 193:38).

Sebelum Aksi Militer Belanda I pada bulan Juli 1947, pers Australia pada umumnya melihat masalah Indonesia sebagai kasus yurisdiksi domestik. Pers mendukung padangan kelompok Oposisi, bahwa kedaulatan Indonesia terletak di tangan Belanda. Pers juga sependapat dengan pemerintah Oposisi bahwa Belanda harus dipertahankan sebagai tetangga Australia, dan bahwa para pemimpin Indonesia janganlah di percaya karena pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Jepang.

Sebuah survei pendapat umum yang dilancarkan pada penghujung 1945 memperlihatkan kecenderungan banyak orang Australia mendukung kekuasaan Belanda atas Kepulauan Indonesia. Namun terdapat sebuah lapisan diantara penduduk Australia, yaitu serikat-serikat Buruh Australia, yang sejak awal dengan kuat mendukung Republik Indonesia. Aksi-aksi mereka, terutama yang di lancarkan oleh Federasi Buruh Pelabuhan (WWF), menjadikan masalah Indonesia sebagai masalah politik Australia (Adil, 1993:39). Lihat lampiran

6.1.2 Dampak terhadap Indonesia

Dukungan Australia terhadap Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan Australia untuk menyelesaikan masalah Belanda dan

Indonesia. Berbagai bentuk dukungan yang dilakukan Australia untuk menyelesaikan masalah Belanda dan Indonesia yaitu; pada 27 Maret 1947 di tandatangani Persetujuan Linggarjati. Australia melihat persetujuan itu sebagai titik awal sebuah perkembangan menuju kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati ini memberikan dampak bagi Indonesia baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif Persetujuan Lingggarti Indonesia adalah wilayah Indonesia diakui secara *de facto*, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Hal ini menguatkan kedudukan Indonesia dimata internasional. Adapun dampak negative dari Perjanjian Linggarjati ini adalah Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena masih di akui secara *de facto* saja meliputi Jawa, Sumatera dan Madura dan Indonesia pada saat itu di bentuk negara RIS oleh Belanda. Selain di bentuk negara RIS, Indonesia harus bergabung dalam persemaikmuran Belanda (Tobing, 1986:35).

Atas dukungan Australia, konflik antara Indonesia dan Belanda dapat diselesaikan meskipun pada akhirnya Belanda melanggar isi dari Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer Belanda yang pertama. Atas tindakan Belanda pemerintah Indonesia di Australia menghimbau pemerintah Australia untuk mengajukan sengketa Belanda-Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian Australia mengusulkan masalah-masalah Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB.

Dengan dukungan Australia, sehingga bisa membawa permasalahan Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Australia menyusun konsep arbitrase, akan tetapi konsep tersebut gagal mendapatkan jumlah suara yang di butuhkan untuk disetujui. Sebagai gantinya, Amerika Serikat mengeluarkan resolusi dan menyarankan agar Dewan keamanan menawarkan Jasa-Jasa Baik yang di kenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia memilih Australia sebagai delegasi Indonesia (Critchley, 1995:12). Hasil dari Komisi Tiga Negara juga mempunyai dampak bagi Indonesia baik itu dampak negatif maupun dampak positif adapun dampak bagi Indonesia. Dengan Perjanjian Renville, Indonesia harus menyetujui di bentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).

Setelah di lakukannya Perjanjian Renville kemudian Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer yang kedua dengan menggunakan serangan mendadak. Angkatan perang Belanda pada saat itu menduduki ibukota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dan menangkap pemimpin paling terkemuka termasuk Soekarno dan Hatta. Serangan Agresi Militer yang kedua ini banyak memakan korban. Situasi yang seperti ini mendapat perhatian dari pemerintah Australia, karena Agresi Militer Belanda yang kedua ini merupakan suatu pelanggaran yang disengaja oleh Belanda (George, 1980:180).

Karena gagalnya Belanda dalam memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, Australia meminta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memasukkan masalah Indonesia dalam agenda sidang umum ketiga. Pemerintah Belanda berusaha menghindar karena ketidaksenangan selanjutnya dari keadaan yang memalukan dalam pembahasan mengenai masalah Indonesia. Akhirnya tercapai juga hasil perundingan pada tanggal 7 Mei 1949 dalam persetujuan yang disebut dengan Pernyataan Roem-Royem, dalam pernyataan tersebut kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan resolusi-resolusi Dewan Keamanan (Carihctley, 1995:19). Dalam pernyataan Roem-Royen ini Indonesia akan mendapatkan kedaulatan secara utuh dan operasi militer Belanda akan dihentikan dan tawanan perang akan di bebaskan.

Setelah di lakukannya Pernyataan Roem-Royem, dilakukan Konferensi Meja Bundar yang di selenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Penyerahan kedaulatan itu secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Atas bantuan dan dukungan dari Australia, Indonesia memperoleh kedaulatan penuh. Akan tetapi dalam Konferensi Meja Bundar ini terdapat dampak negatif karena pada saat itu Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan masalah Irian Barat inilah yang nantinya akan mempengaruhi hubungan Australia dengan Indonesia.

6.2 Dampak Hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa Partai Liberal terhadap Australia dan Indonesia Tahun 1949-1966.

Hubungan Australia dengan Indonesia mengalami perubahan pada Masa Partai Liberal yang berkuasa di Australia. Hubungan Australia dengan Indonesia pada kurun waktu 1949-1966 bisa dikatakan merupakan suatu hubungan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa Partai Buruh. Partai Liberal dalam menjalankan politik luar negerinya sangat dipengaruhi oleh negara sekutunya sehingga nantinya akan berdampak pada hubungan kedua negara. Berikut akan dijelaskan bagaimana dampak hubungan Australia dengan Indonesia pada masa Partai Liberal.

6.2.1 Dampak terhadap Australia

Hubungan Australia dengan Indonesia pada Masa Partai Liberal banyak mengalami ketegangan. Ketegangan tersebut berawal ketika Partai Liberal dihadapkan dengan masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat merupakan masalah yang dihadapi oleh Belanda dan Indonesia, karena dalam masalah Irian Barat Australia lebih mendukung Belanda daripada Indonesia maka dipastikan bahwa dalam menyelesaikan masalah Irian Barat akan mengalami hambatan-hambatan.

Australia menentang Indonesia dalam menuntut Irian Barat agar masuk ke dalam bagian wilayah Irian Barat. Australia menentang keras sikap Indonesia karena Australia menginginkan Irian Barat di kuasai kembali oleh Belanda. Jika Irian Barat di kuasai oleh Belanda maka masa depan Australia akan terjamin. Hal itu berubah ketika Presiden Amerika Serikat yang awalnya berikap netral terhadap berubah menjadi penengah yang lebih aktif. Pemerintah Kennedy kemudian berusaha membujuk Belanda dan Australia agar bersikap lebih lunak dalam menghadapi masalah Irian Barat. Amerika Serikat menekankan kepada Australia dan Belanda, apabila Belanda dan Australia menolak tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat maka Australia dan Belanda tidak akan mendapatkan dukuan dari Amerika Serikat (Soebadio, 2002:171).

Akibat dari keberpihakan Amerika Serikat terhadap Indonesia membuat pemerintah Australia melakukan langkah-langkah diplomasi yang selaras dengan Amerika Serikat. Pada 1962 atas desakan PBB dan Amerika Serikat di adakanlah perundingan antara Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan PBB. Puncak perundingan antara Indonesia dan Belanda ini adalah disepakati Persetujuan New York yang di tandatangi kedua bilah pihak yang bersengketa. Penyelesaian Irian Barat merupakan suatu kegagalan diplomatik bagi Australia. Setelah lebih dari 10 tahun mengemukakan keras klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat, akhirnya Australia secara terpaksa harus menerima Persetujuan New York tahun 1962. Pemicu utama yang menyebabkan Australia harus menerima klaim Indonesia adalah sikap Amerika Serikat yang membela Indonesia. Hal ini akan berdampak pada hubungan Australia dengan Belanda, dan juga berdampak pada hubungan Australia dengan Indonesia dimasa yang akan mendatang.

Setelah berakhirnya masalah Irian Barat, Australia dihadapkan dengan masalah Konfrontasi Malaysia. Kebijakan Australia mengenai politik Konfrontasi Malaysia pada tahap awal dipengaruhi oleh Menteri Luar Negeri Australia Garfield Barwick. Pandangan Garfield Barwick masalah Asia Tenggara harus menjadi aspek penting dalam hubungan luar negeri Australia (Adil, 1997:63). Pada tahap ini Australia tidak mengikatkan dirinya kepada Inggris, karena tidak ada jaminan mengenai berapa lama Inggris bermaksud membantu pertahanan Australia sesudah dibentuknya Federasi Malaysia. Apabila Australia tidak mengetahui hal tersebut maka akan jadi masalah, jika Australia membuat komitmen untuk mempertahankan Malaysia, Australia akan menanggung beban tanggung jawab yang semakin besar apabila Inggris menarik diri.

6.2.2 Dampak terhadap Indonesia

A. Dampak Politik

Setelah proses pengakuan kedaulatan Indonesia masih mempunyai satu permasalahan dengan Belanda yaitu masalah Irian Barat. Sesuai dengan perjanjian

KMB yang menyatakan bahwa masalah Irian Barat akan di selesaikan dengan jalan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda, maka kemudian diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1950 sampai dengan 1 April 1950 di Jakarta (Cholil, 1979:22).

Pada bulan Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia yang awalnya berbentuk federal kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah perundingan bilateral yang pertama gagal, Indonesia dan Australia kembali melakukan perundingan bilateral pada tanggal 4 Desember 1950 di Den Haag. Belanda kemudian mengajukan usul terkait penyelesaian konflik Irian Barat dengan menempatkan kedaulatan Irian Barat di bawah kekuasaan Uni Indonesia-Belanda. Usul ini secara tegas di tolak oleh Indonesia. Hasil dari perundingan yang kedua ini bahwa Indonesia tetap menuntut Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1951, 1954 mengalami kegagalan. Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Pada tanggal 17 Agustus Indonesia secara resmi mendaftarkan masalah Irian Barat dalam sidang ke-9 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Critchley, 1995:114). Kegagalan Indonesia dalam pengajuan resolusi Sidang Umum PBB pada tahun 1954 memaksa Indonesia menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika secara bulat mendukung upaya Indonesia untuk memperoleh kembali wilayah Indonesia.

Akibat kegagalan penyelesaian masalah Irian Barat di PBB, Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas. Pada tanggal 15 Februari 1956 Indonesia memutuskan secara sepihak hubungan Uni Indonesia Belanda. Kemudian disusul keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan secara keseluruhan semua persetujuan KMB secara sepihak juga pada 27 Maret 1956 (Cholil, 1979:20). Dalam bidang politik, setelah Belanda memasukkan Irian Barat menjadi salah satu bagian Kerajaan Belanda, maka Indonesia mengambil tindakan meresmikan pembentukan

provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu. Provinsi tersebut meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.

B. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi juga dilakukan pembatalan hubungan Uni Indonesia-Belanda dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut keuangan ekonomi, dengan membatalkan hutang-hutang Indonesia kepada Belanda sebesar 3.661 juta gulden. Reaksi juga datang dari rakyat Indonesia, pada tanggal 2 Desember 1957 pemogokan-pemogokan umum dilancarkan dilancarkan selama 24 jam terhadap semua perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia (Cholil, 1979:20).

Selain itu pemerintah Australia melarang perusahaan penerbangan Belanda mengadakan aktivitas penerbangan di Indonesia. Larangan peredaran publikasi dan media berita Belanda dan tindakan untuk mempercepat pengeluaran Belanda yang tidak berpenghasilan tetapi dari Indonesia. Disamping itu, telah diatur juga mengenai pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan penetapan keputusan Menteri Republik Indonesia tertanggal 17 September 1957. Seluruh perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasikan meliputi kurang lebih 700 perusahaan dengan nilai 1500 juta dollar Amerika. Pemerintah Indonesia juga berusaha memindahkan pasaran bursa tembakau dari negeri Belanda ke Bremen yang bertujuan untuk memutus keuntungan yang mungkin dapat diperoleh Pemerintah Belanda dalam hubungan perdagangan dunia dengan pemerintah Indonesia (Cholil, 1979:21).

Sikap pemerintah Indonesia untuk mengadakan konfrontasi ekonomi dan politik mendapat tanggapan dari pemerintah Australia. Pada tanggal 12 Desember 1956 Menteri Luar Negeri Australia Richard Casey memberikan pernyataan resmi dalam Sidang Kabinet. Menyatakan bahwa pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh Indonesia dan pengusiran secara besar-besaran rakyat Belanda dari Indonesia adalah suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tindakan konfrontasi ekonomi yang dilakukan Indonesia, dapat mengurangi simpati dan pemberian

bantuan modal asing bagi negara-negara berkembang. Tindakan Indonesia ini dapat melanggar konsep tata tertib internasional yang telah dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang semestinya harus dipertahankan (Crithcley, 1995:144).

Selain masalah Irian Barat, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah pemberontakan PRRI/Permesta. Pemberontakan tersebut memberikan dampak yang sangat luas bagi Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan daerah kekacauan yang terjadi berturut-turut selama 10 tahun mengkis ekonomi Indonesia dalam sekali. Untuk menghancurkan pemberontakan tahun 1953 misalnya Menteri Pertahanan menaikkan anggarannya dengan Rp 1 Miliar dan ini tidak termasuk anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar 500 juta untuk daerah-daerah yang dibebaskan dari pemberontak. Anggaran kementerian-kementerian berjumlah 3 kali lipat anggaran Kementerian Ekonomi dan lima kali anggaran Kementrian Pekerjaan Umum. Tampak bahwa tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Blok Barat yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Inggris serta didukung oleh Australia, memberikan dampak negatif yang berat bagi Indonesia dari tahun 1950-1960 (Soebadio, 2002:290). Pemberontakan ini juga membawa dampak terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontak PPRI/Permesta membuat hubungan Australi dengan Indonesia menjadi tidak harmonis.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat, lima dan enam maka diperoleh kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang hubungan Australia dengan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor keamanan. Dari Faktor geografis, Australia menempati lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, serta dikelilingi oleh dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bagian barat Australia diapit oleh Samudera Hindia yang merupakan jalur transportasi yang menghubungkan Australia dengan benua Afrika, anak benua India dan kawasan Asia Tenggara. Sementara dibagian timur Australia dikelilingi oleh Samudera Pasifik yang menghubungkan dengan bagian utara dan selatan benua Amerika. Faktor ekonomi, Indonesia merupakan negara yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi Australia. Selain kaya sumber daya alam Indonesia memiliki penduduk yang melimpah sehingga bisa dijadikan pasar bagi Australia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, Australia tentunya harus membantu pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, ini berarti bantuan luar negeri Australia harus dipandang sebagai memiliki motif etika didalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya (Richard, 2005:12). Salah satu tujuan pemerintah Australia ialah untuk mempertinggi tingkat perekonomian nasional yang akan dicapai melalui sarana politik luar negeri. Karena itu hampir dalam setiap langkah politik luar negerinya Australia akan selalu terkandung motif-motif kepentingan ekonomi. Dalam faktor kamanannya Keamanan suatu negara atau beberapa

negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa lebih dulu memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan, diantara negara-negara kawasan tersebut. Dalam hubungan internasional, negara akan mempertahankan segalanya demi pencapaian keamanan nasionalnya. Dalam berbagai periode sejarah, keamanan nasional merupakan nilai yang sangat penting dalam menjalin hubungan internasional. Secara sederhana, keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan kekuatan.

2. Hubungan Australia dengan Indonesia dipengaruhi Partai yang sedang berkuasa di Australia. Hubungan Australia dan Indonesia pada masa Partai Buruh bisa dikatakan sangat baik. Australia mendukung Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Agresi Militer Belanda yang pertama sama kedaulatan secara penuh diberikan kepada Indonesia, Australia selalu mendukung Indonesia. Hubungan Australia dan Indonesia pada Masa Partai Liberal mengalami perubahan dibandingkan dengan masa Partai Buruh pada saat itu. Hubungan Australia dengan Indonesia pada saat itu dihadapkan dengan beberapa masalah yang mengakibatkan Australia menentang Indonesia.
3. Dampak hubungan Indonesia dengan Australia terhadap Australia dan Indonesia juga dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa di Australia. Dampak bagi Australia pada masa Partai Buruh tahun 1945-1949, menjadikan Australia sebagai tetangga yang baik bagi Australia, selain itu Partai Buruh pada saat itu lebih mementingkan hidup bertetangga dengan damai sehingga menciptakan keamanan nasional. Sedangkan dampak bagi Indonesia pada saat itu dengan dukungu dan simpati dari Australia, Indonesia berhasil meraih kemerdekaan secara internasional dan masuk menjadi anggota PBB. Dampak hubungan Australia dan Indonesia pada masa Partai Liberal sangat mempengaruhi kedua negara. Australia akan dihadapkan dengan masalah Irian Barat dimana Australia berdiri untuk menentang Indonesia. Dampak bagi

Indonesia juga sangat berpengaruh, berbagai cara dilakukan Indonesia untuk mendapat Irian Barat kembali ke dalam wilayah Indonesia.

7.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagi calon guru sejarah hendaknya melanjutkan penelitian serupa tentang Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik pada tahun 1945-1966;
- 2) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai Dinamika Hubungan Australia dengan Indonesia dalam Bidang Politik pada tahun 1945-1966;
- 3) bagi pemerintah Australia dan Indonesia, supaya bisa menjaga hubungan kerjasama antar negara yang harmonis dan lebih baik lagi. Khususnya dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adil, H. 1993. *Hubungan Australia dengan Indoneia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.
- Adil, H. 1997. *Kebijaksanaan Australia terhadap Indonesia 1962-1966*. Jakarta: CSIS.
- Bhakti, I.N. 2001. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia*. Jakarta. LIPI
- Chauvel, R. 1992. *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chauvel, R. 2004. *Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP.
- Charles, A. 1981. *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali
- Cholil, M. 1971. *Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- Critchley, S. 1995. *Hubungan Australia dengan Indonesia Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ferandes, F. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- George, M. 1980. *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pantja Simpati (Anggota IKAPI).
- Gottschalk, L.1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugoho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hamid, Z. 1999. *Sistem Politik Ausralia*. Bandung: Remaja Rosdakrya.
- Hamzah, T.M. 2008. Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemenangan Partai Buruh. *Jurnal Luar Negeri Vol 25:13*

- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Krisnadi, I.G. 2009. "Politik Negeri Kangguru Membendung Bahaya Merah dari Indonesia 1950-1965". *Historia Vol 2:174-198*.
- Kroef, J. 1976. *Masalah Politik dan Keamanan Australia*. Jakarta: Yayasan Paritrana.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Moeliono, A.M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Morgenthau J. 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muyasaroh, U. 2015. "Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat Tahun 1949-1962". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Mukmin, H. 1991. *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus PenyelesaianKonfrontasi Indoneia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, A.H. 1985. *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 5. Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: Gunung Agung
- Notosusanto, N. 1991. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balasi Pustaka.
- Rais, A. 1989. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya-Indonesia
- Ratih, H. 1992. *Suku Putihnya Asia (Mencari Jati Dirinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reid, A. 1955. *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

- Soebadio, H. 2002. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siboro, J. 1989. *Sejarah Australia*. Bandung: Tarsito Bandung.
- Sufri, Y. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunardi. 1985. *Politik Luar Negeri Australia di Bawah Partai Buruh*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Suryadinata, L. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea*. Jakarta: LP3ES.
- Suryohadioprojo. S. 1996. *Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya*. Jakarta: Internusa.
- Thayeb, M. 2008. "Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemenangan Partai Buruh". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggartjati*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Tobing, K.M.L. 1987. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wijayanti, Y. 2012. "Hubungan Biteral Indonesia-Australia tahun 1945-1995" Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wuryandari G. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

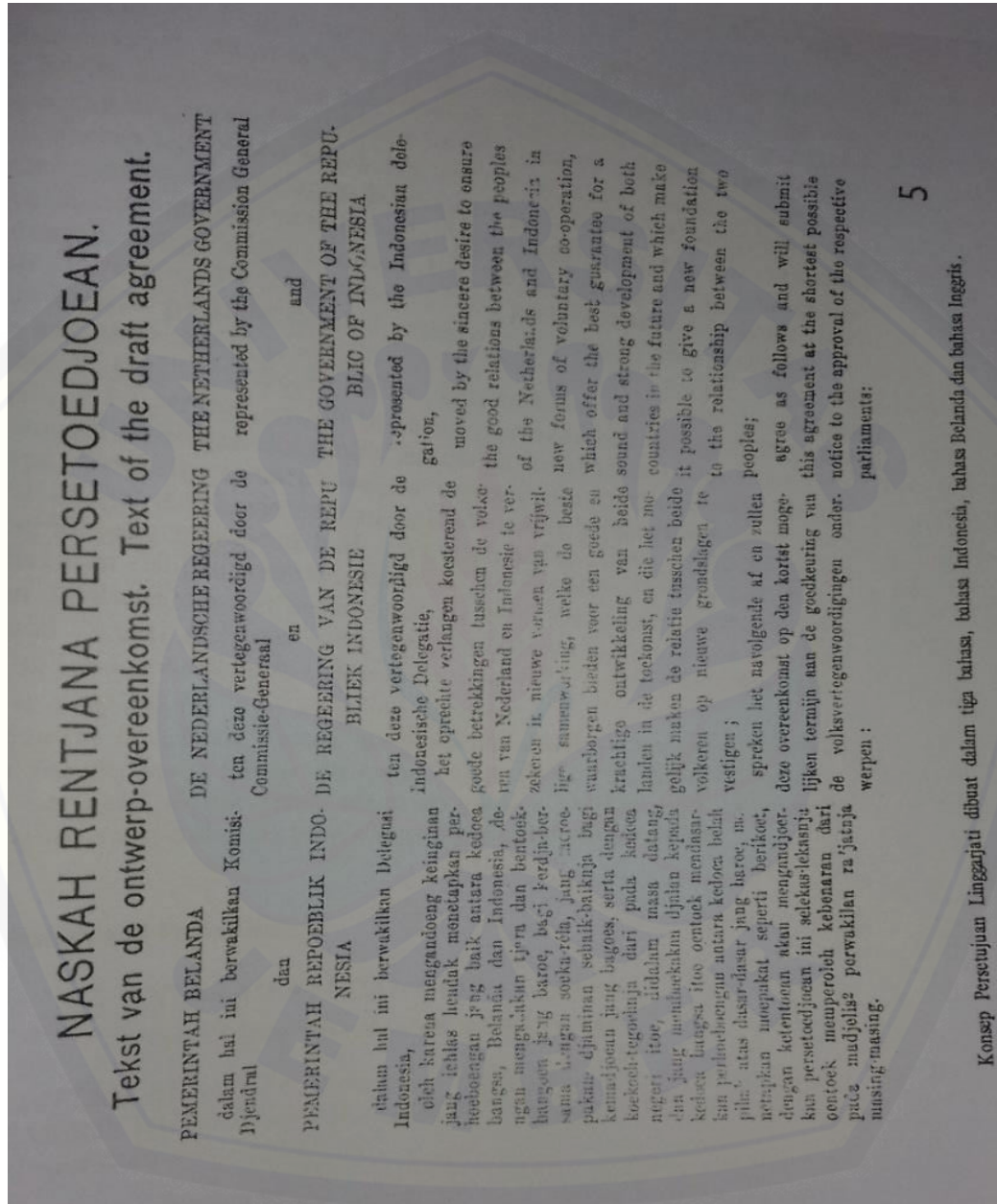
Lampiran A.

MATRIKS PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN PENELITIAN	PERMASALHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Hubungan Internasional	Dinamika Hubungan Indonesia dengan Australia dalam Bidang Politik Tahun 1945-1966	1. Jenis Penelitian a. Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian a. Penelitian Kepustakaan dan Studi Literatur	4) bagaimana latar belakang hubungan politik Indonesia dan Australia pada tahun 1945-1966? 5) bagaimana dinamika hubungan politik Indonesia dan Australia pada tahun 1945-1966? 6) bagaimana dampak hubungan politik Indonesia dan Australia terhadap Indonesia?	1. Buku 2. Skripsi 3. Jurnal 4. Lapoan Penelitian Tempat pencarian sumber: a) Perpustakaan Universitas b) Perpustakaan Pendidikan Sejarah c) Perpustakaan Daerah Jember	Pendekatan: Hubungan Internasional Teori: Realisme Politik Metode: 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi

Lampiran B

NASKAH PERJANJIAN LINGGARJATI



Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta: PT Gunung Agung

tampak pemerintahan Belanda di Indonesia atau pemerintahan bayangan kolonial, yang berkuasa atas senjata: jenderal Spoor c.q. *the colonial monger*?

Kejadian di Bogor merupakan pukulan pertama yang dialami idealisme rakyat Indonesia. Untung jangkauan komunikasi waktu itu tidak begitu luas, sehingga kekecewaan yang mengganggu kepercayaan orang-orang di daerah Bogor-Jakarta tidak secara langsung dapat dirasakan di daerah lain. Oleh sebab itu, sekalipun rakyat masih tetap mempunyai optimisme terhadap pokok-pokok persetujuan tersebut, optimisme itu sudah berosok, pengharapan yang tinggi, yang kemarin dinyatakan dengan mengibarkan bendera dan penyarungan pedang, kini terasa barisan-barisan pemuda kembali menghunus pedang, siap menghadapi segala kemungkinan.

Sejak peristiwa Bogor iklim keterbukaan yang mekar sekejap tanggal 15 Nopember, sudah terkutup rapat kembali. Sikap dan wajah para anggota delegasi Republik Indonesia kembali menunjukkan rasa was-was. Optimisme untuk segera membangun suatu rumah sebagai tempat tinggal dan kerja dengan Belanda sudah pudar. Sedangkan para pemimpin yang mengenal baik rakyat Belanda, malah sudah menjalin persahabatan dengan mereka, seperti Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir, harus mengakui bahwa dengan penguasa Negeri Belanda yang tetap menetapkan keuntungan dan harta di atas keadilan dan kemanusiaan, tidak dapat diadakan persetujuan yang jujur.

Namun demikian, untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terhormat yang dapat dipercaya, pemerintah Republik bertekad untuk tetap mempertahankan makna dan isi rencana persetujuan yang sudah dicapai antara Belanda dan Indonesia.

B. Naskah asli Persetujuan

NASKAH RENCANA PERSETUJUAN (Penulisan disesuaikan dengan EYD)

PEMERINTAH BELANDA, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jendral dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indone-

sia, dengan mengadakan cara dan bentuk-bentuk yang baru, bagi kerja bersama dengan suka rela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh-teguhnyanya dari pada kedua negeri itu, di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat seperti berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran dari pada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya, selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersamasama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawarahkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4

(1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo¹⁾ dan Timur-Besar²⁾, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

(2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan daripada wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan berausyawaratan tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu, yang ter-

1) Kalimantan

2) Sulawesi, NTT, NTB dan Maluku, yang kemudian dikenal sebagai NTT. (Negara Indonesia Timur).

diri dari satu pihak daripada kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga oleh majelis-majelis perwakilan rakyat negara-negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di puncak Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan lagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negara Belanda, dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

- a) pertanggunggaan hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban-kewajibannya yang satu kepada yang lain;
- b) hal kewarga-negaraan untuk warganegara Belanda dan warga-negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;
- c) aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semupakat;
- d) aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e) pertanggunggaan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

(1) Anggaran-anggaran itu akan direncanakan kelak oleh suatu per-musyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indo-nesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggaran-anggaran itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13

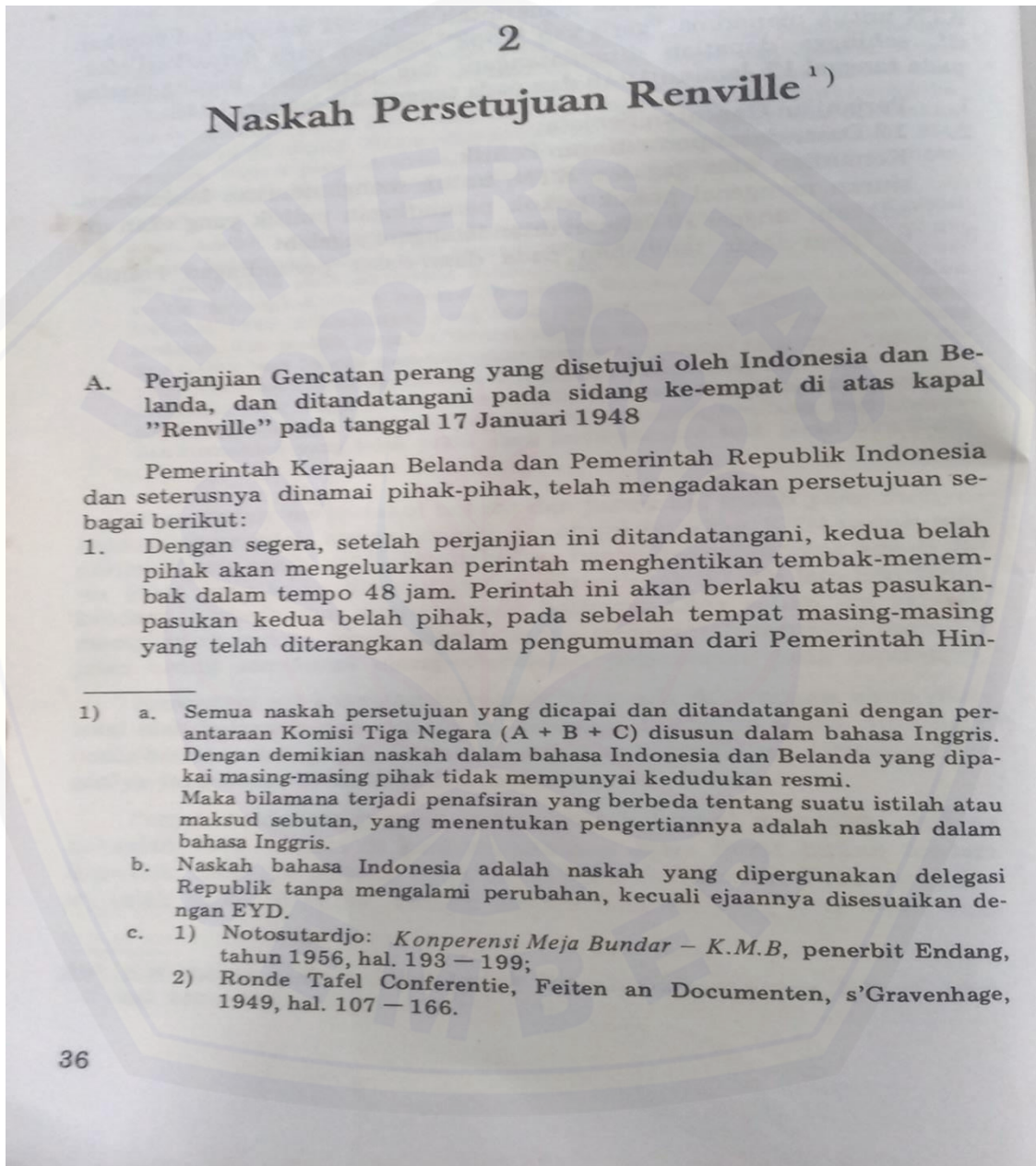
Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

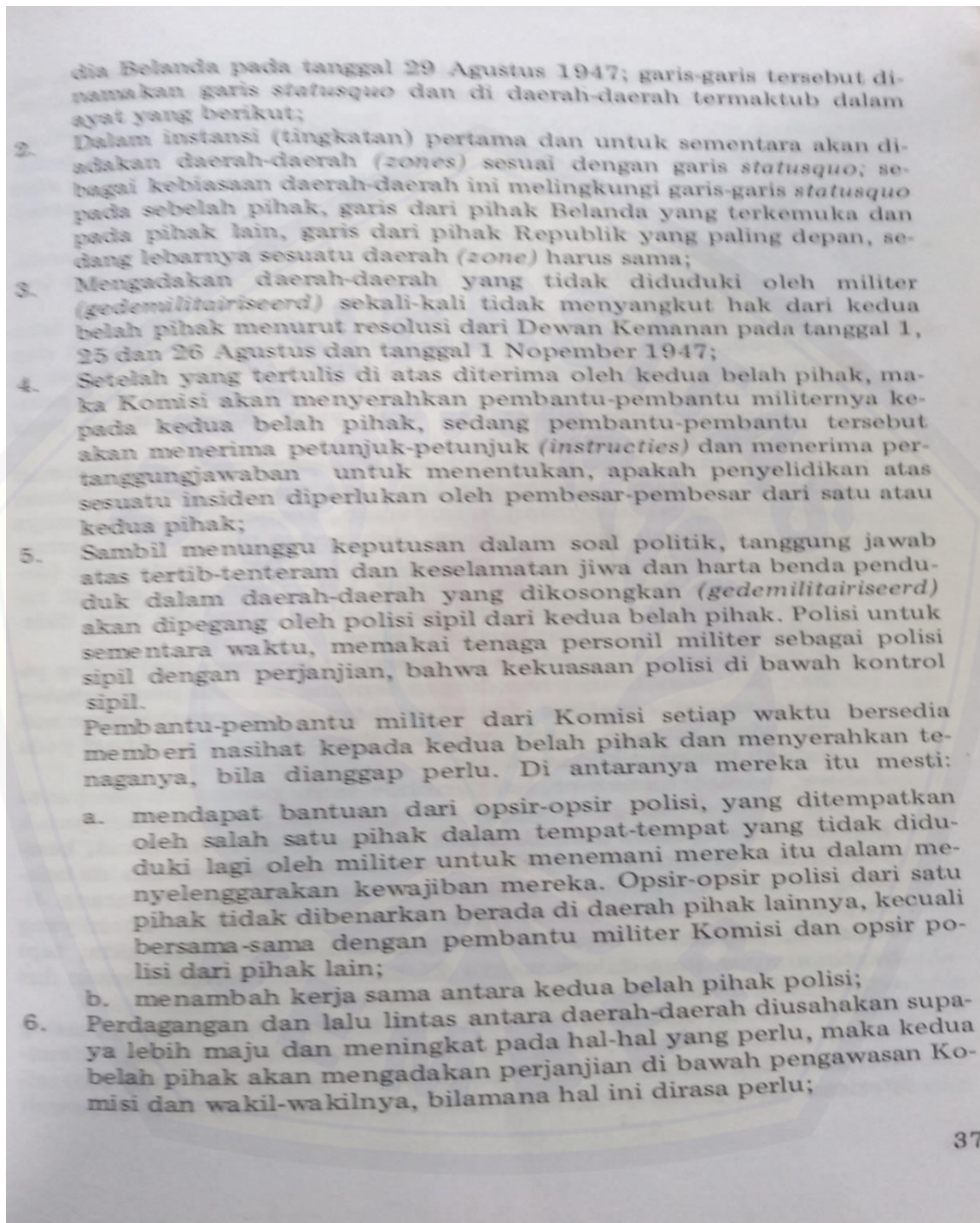
Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang

Lampiran C

NASKAH PERJANJIAN RENVILLE



Sumber: Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.



Sumber: Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.

7. Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak:
- a. Dilarang mengadakan *sabotase*, menakut-nakuti (intimidasi), pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang dari apa saja dan dari tiap-tiap orang dan memakai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;
 - b. Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda-propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;
 - c. Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;
 - d. Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada Komisi Tiga Negara;
 - e. Penghentian dengan segera penyiaran-penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan-gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (dengan menyebutkan nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatkannya dalam menjalankan kewajiban?
 - f. Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulain perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan mana dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak;
8. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer Komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di belakang kedudukan terdepan dari Tentara Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan yang semacam itu, maka kesatuan-kesatuan itu secepat mungkin, tapi bagaimanapun juga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;
9. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang didemiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di sebelah daerah yang didemiliterisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah

Sumber: Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.

pengawasan pembantu militer Komisi itu dan dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang;

10. Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu empat belas (14) hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan empat belas (14) hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang lain dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu empat belas hari yang berlangsung.

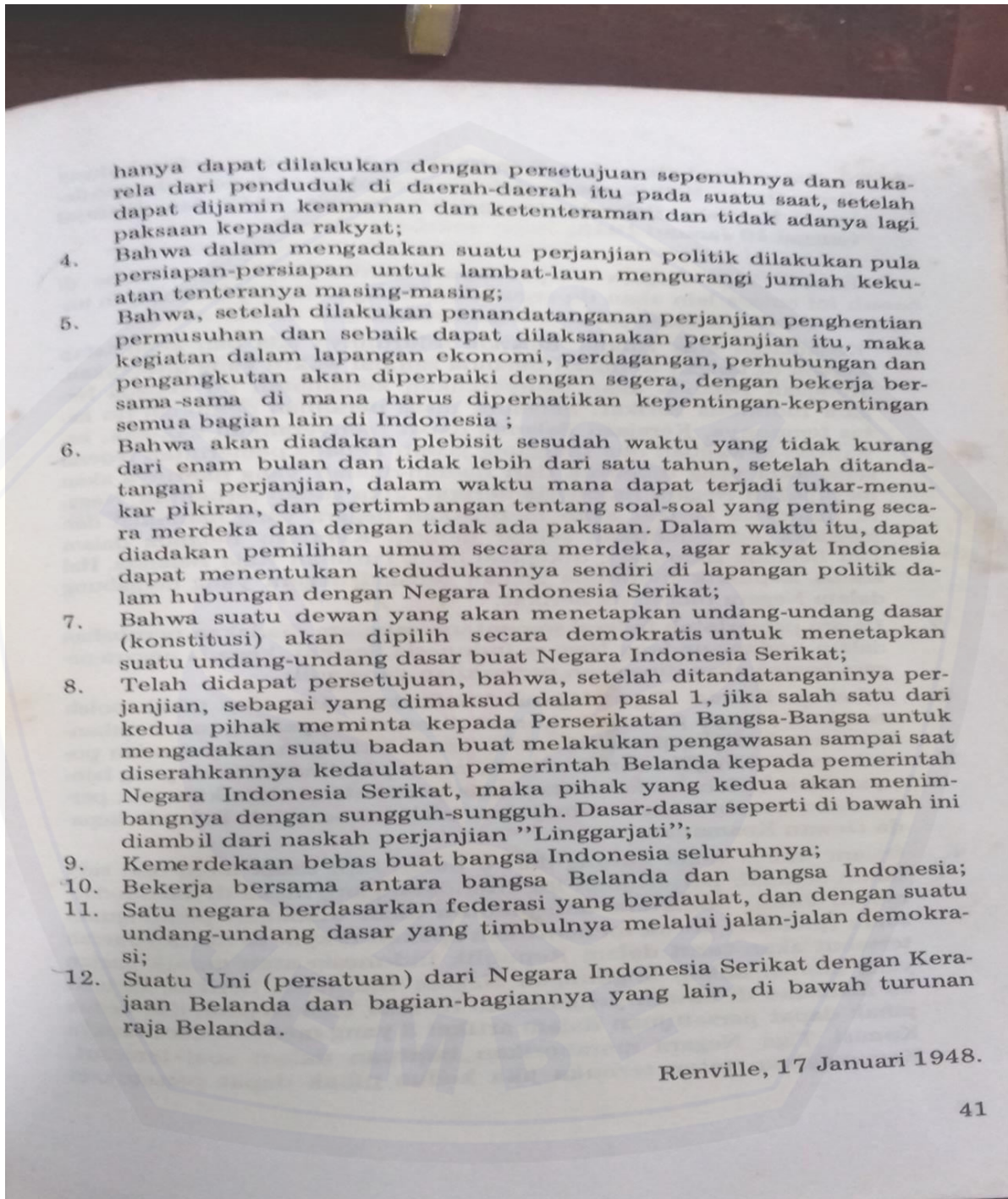
Renville, 17 Januari 1948.

B. 12 Dasar Persetujuan Politik Renville.

Pokok-pokok yang merupakan dasar-dasar yang sudah disetujui delegasi pemerintah Belanda dengan delegasi pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan-perundingan politik pada sidang keempat yang diadakan Komisi Tiga Negara pada tanggal 17 Januari 1948.

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bahwa pemerintah masing-masing telah menerima pokok-pokok perjanjian penghentian permusuhan yang sudah ditandatangani dan merupakan dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut:

1. Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan prinsip naskah perjanjian "Linggarjati";
2. Telah sewajarnya, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui, bahwa kedua pihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dan kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan (*repressailles*);
3. Telah sewajarnya, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan pamong praja di daerah-daerah

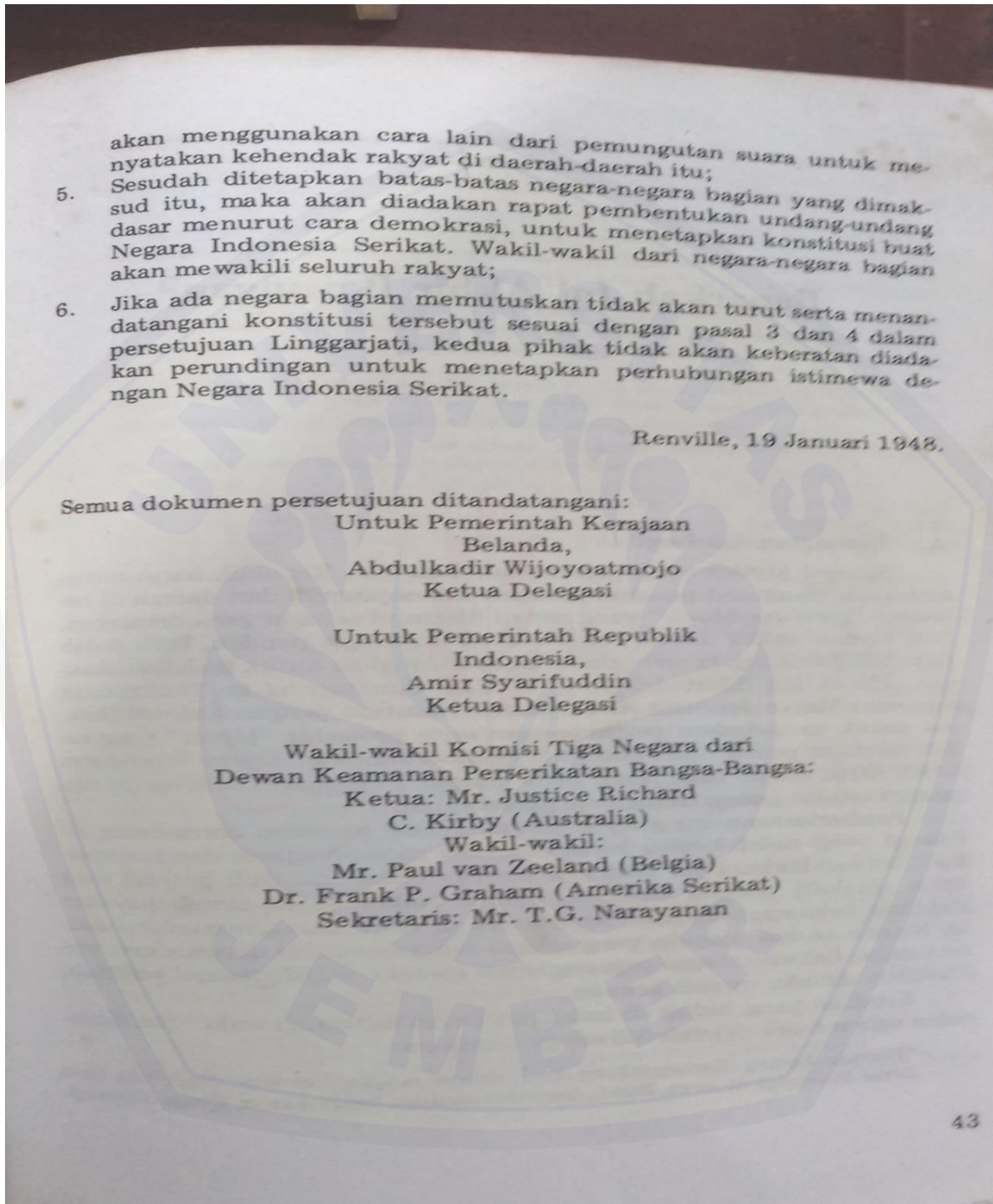


Sumber: Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.

- C. 6 Dasar Tambahan dari Komisi Tiga Negara untuk Pembukaan Perundingan Politik antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Kerajaan Belanda, tanggal 17 Januari 1948 dan disetujui tanggal 19 Januari 1948.

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut:

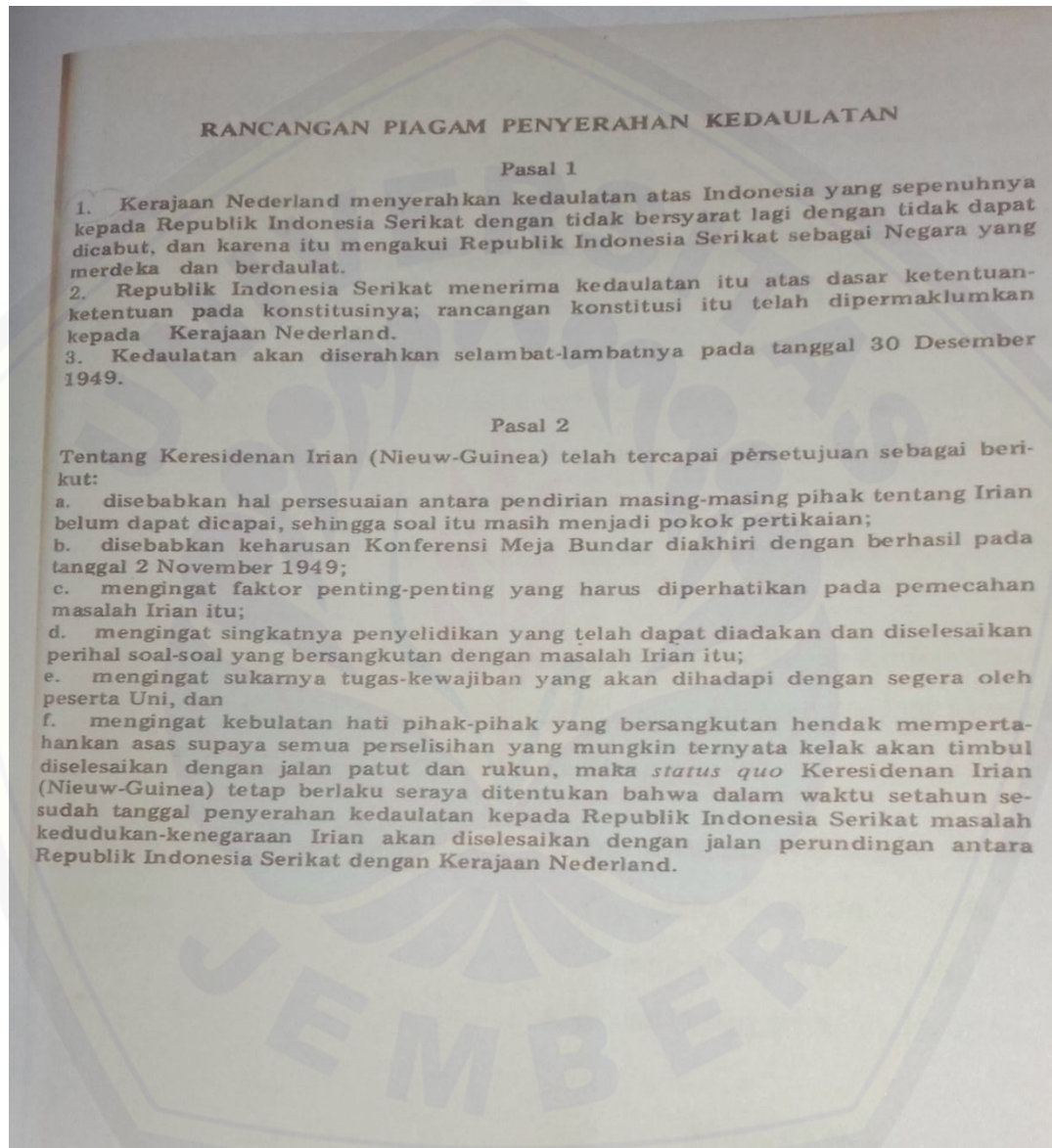
1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Belanda. Hal status Republik Indonesia adalah sebagai negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat;
2. Dalam pemerintah federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang Negara Indonesia Serikat, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
3. Sebelum Komisi Tiga Negara dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu; permintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan;
4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisit) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya Komisi Tiga Negara memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan



Sumber: Tobing, K.M.L. 1986. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*.
Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Lampiran D

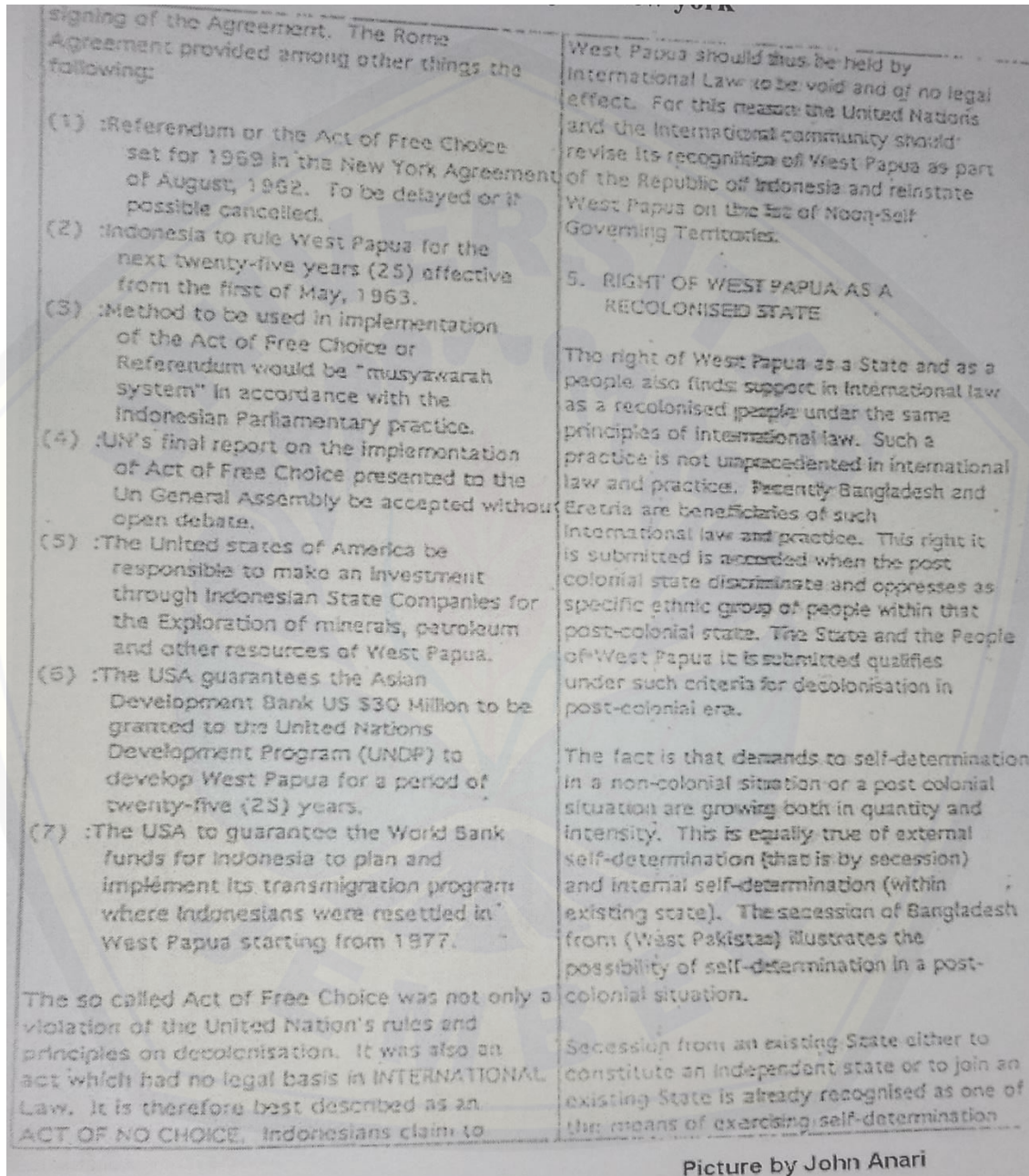
PIAGAM PENYERAHANKEDAULTAN



Sumber: Tobing, K.M.L. 1987. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Lampiran E

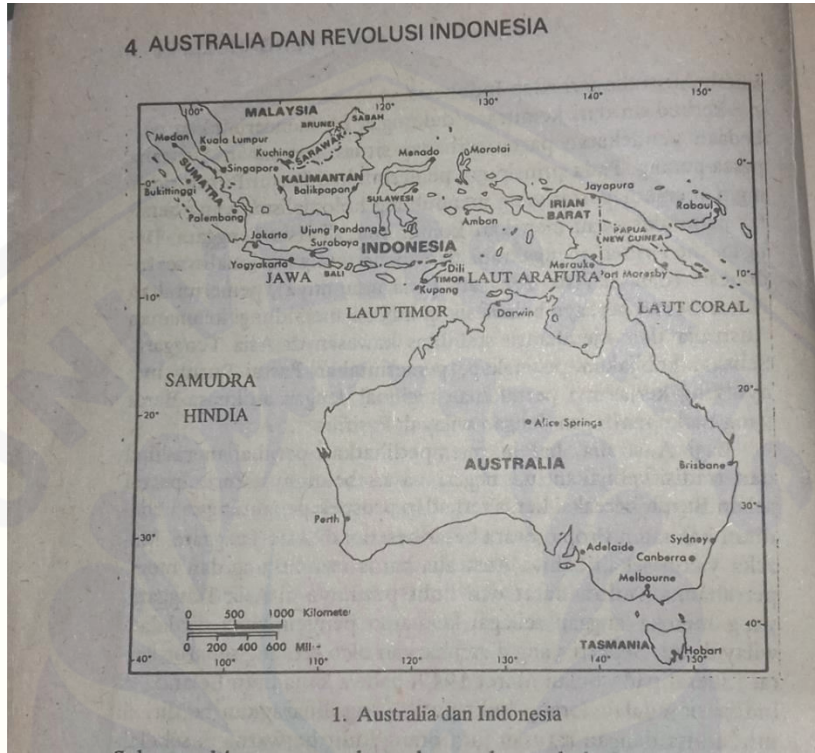
ISI PERJANJIAN NEW YORK



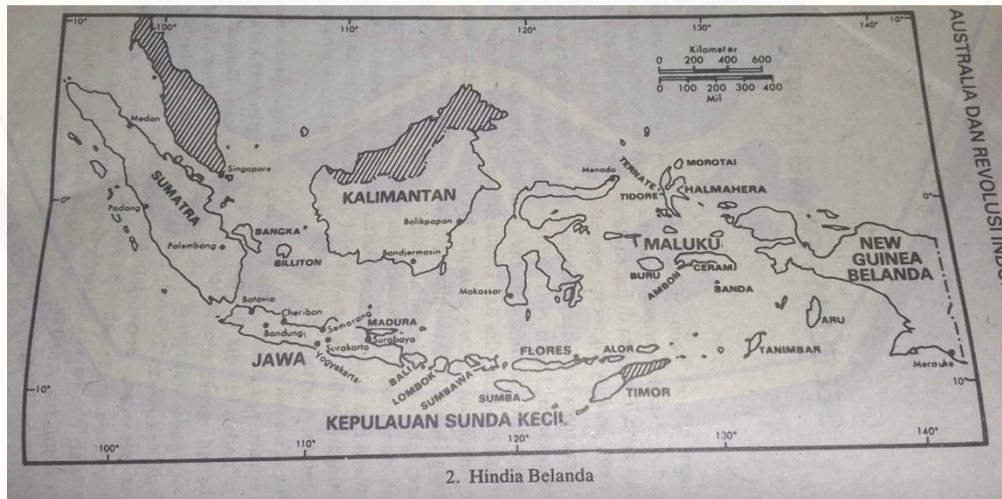
Sumber: <http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/01/09/mengintip-catatan-sejarah-indonesia-di-pusat-arsip-nasional-australia-715589.html>

Lampiran F

PETA LETAK AUSTRALIA DAN INDONESIA



Gambar 1: Letak wilayah Australia dan Indonesia



Gambar 2: Peta wilayah Indonesia

Sumber: George, M. 1986. *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta. PT Pantja Simpati.

Lampiran G

STATUS QUO INDONESIA



Gambar 3. Situasi *Status Quo* Indonesia pada saat Pemberontakan PRRI/Permesta

Sumber: Soebadio, H. 2002. *Keterlibatan Australia dalam PRRI/Permesta*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

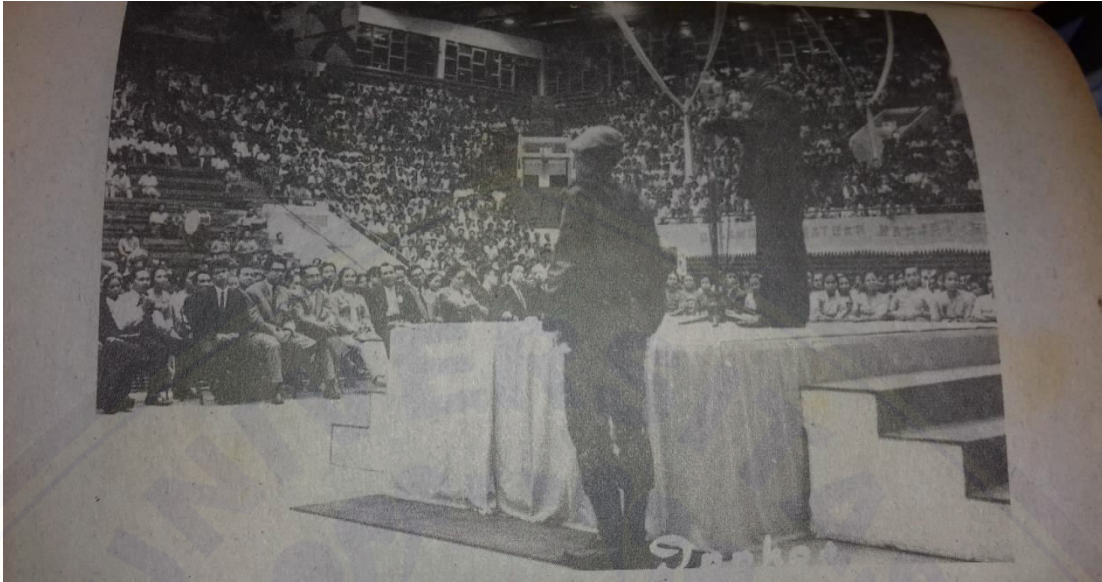
Lampiran H

Gambar 4: Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy ketika diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 25 Januari 1964 dalam rangka mencari penyelesaian konflik Indonesia Malaysia



Gambar 5: Apel besar Sukarelawan di depan Istana Merdeka pada tanggal 5 Mei 1964. Pada saat itu dikeluarkan komando “Ganyang Malaysia”

Sumber: Mukmin, H. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



Gambar 6: Rapat umum anti Pangkalan Asing di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1965 yang menelorkan Komando “Indonesia Keluar dari PBB”.

Sumber: Mukmin, H. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



Gambar 7: Penandatanganan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung Pancasila, Pejambon Jakarta. Pada tanggal 11 Agustus 1966 oleh Menlu Indonesia Adam Malik, dan Menlu Malaysia Tun Abdul Razak

Sumber: Mukmin, H. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran I



Gambar 8: Presiden Soekarno berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Robert Menzies di Istana Negara tahun 1959.



Gambar 9: Letnan Jendral Nasuyion bersama Perdana Menteri Australia Menzies tahun 1961.

Sumber: <http://luar-negeri.kmpasianan.com.mengintip-catatan-sejarah-indonesia-di-pusat-arsip-nasional-australia-715589>

Lampiran J



Gambar 10: Pertemuan Presiden Soekarno dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan wakil presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1961.



Gambar 11: Penandatanganan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 di New York, Amerika Serikat.

Lampiran K

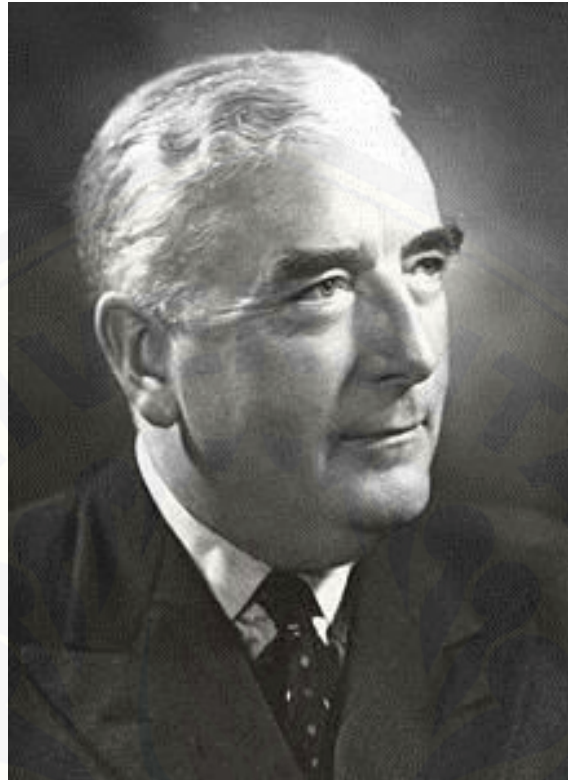
PERDANA MENTERI DAN MENTERI LUAR NEGERI AUSTRALIA



Gambar 12: Perdana Menteri Australia Ben Chifley, Pemerintahan Partai Buruh



Gambar 13: Menteri Luar Negeri Australia Herbett Evata, Pemerintahan Partai Buruh



Gambar 14: Perdana Menteri Australia Robert Menzies, Pemerintahan Partai Liberal



Gambar 15: Menteri Luar Negeri Australia Percy Spender, Pemerintahan Partai Liberal